



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
[LKjIP]
KOTA PASURUAN
TAHUN 2017



© 2018

Kata Pengantar



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kita panjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai salah satu instrumen dalam upaya untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kota Pasuruan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2017 merupakan laporan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2016–2021 yang berisi capaian kinerja, keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, selain itu memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang sangat dibutuhkan, sehingga nantinya dapat menjadi masukan dalam memperbaiki kinerja ke depan supaya lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pasuruan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Pasuruan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pasuruan, Maret 2018
WALIKOTA PASURUAN

Drs. H. SETIYONO, M.Si



Daftar Isi





Daftar Tabel





Daftar Grafik





Daftar Gambar





PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, terdapat 24 (dua puluh empat) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan yang harus ditangani Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan tugasnya Pemerintah Daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi ini dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas pemerintah kepada rakyat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2017 ini disusun dengan memperhatikan berbagai kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang timbul dan mungkin akan timbul (deteksi dini) menyangkut kondisi internal, kondisi eksternal baik regional, nasional maupun internasional dan merupakan bentuk dokumentasi pertanggungjawaban tahunan dengan berdasarkan pada :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999;
2. Peraturan Menteri Pendahayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; dan
3. Surat Keputusan Kepala LAN (Lembaga Administrasi Negara) Nomor 239 Tahun 2003.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2017 merupakan capaian kinerja tahun kedua dari RPJMD periode 2017-2021. Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pasuruan sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2017 ini antara lain adalah :

1. Sebagai salah satu pelaksanaan kewajiban setiap instansi pemerintah sesuai amanat peraturan perundang-undangan, tentang penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Sebagai pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran;
3. Memberikan gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Pasuruan selama Tahun 2017, dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong terwujudnya Kota Pasuruan yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2017 ini antara lain adalah :

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Pasuruan selama Tahun Anggaran 2017 yang merupakan tahun terakhir RPJMD periode 2017-2021;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Pasuruan pada Tahun 2017-2021 untuk bahan acuan, perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Pasuruan di tahun berikutnya;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Pasuruan dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan).

Laporan Kinerja disusun secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran sebagai pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan serta target yang diperjanjikan dan ditetapkan setiap Perangkat Daerah. Sebagai alat pendorong terwujudnya good governance dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

C. KONDISI GEOGRAFIS KOTA PASURUAN

1. Batas Administrasi

Kota Pasuruan secara astronomis terletak antara 112°45"-112°55" Bujur Timur dan 7°35" 7°45" Lintang Selatan, dan secara administratif wilayah Kota Pasuruan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pohjentrek dan Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Barat : Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan



Gambar 1.1 Peta Kota Pasuruan

2. Luas Wilayah

Wilayah Kota Pasuruan tergolong relatif kecil yaitu seluas 35,29 Km² atau 0,07% dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Secara Administrasi Kota Pasuruan terdiri dari 4 Kecamatan dengan 34 Kelurahan.

3. Topografis

Kota Pasuruan secara umum merupakan wilayah pesisir, dengan ketinggian rata-rata ± 4 m diatas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Pasuruan memiliki tingkat kemiringan antara 0-1persen, yang melandai dari selatan ke utara; di sebelah utara terdapat bagian yang agak cekung sehingga pembuangan airnya lambat.

Proses pembentukan tanah di Kota Pasuruan didominasi oleh proses sedimentasi yang dihasilkan oleh tiga sungai yang melintas di Kota Pasuruan, yakni: Sungai Gembong, Sungai Petung dan Sungai Welang. Tanah tersebut dikenal dengan tanah aluvial, yaitu tanah yang berasal dari pengendapan atau sedimentasi aliran air permukaan. Lokasi pembentukan tanah aluvial umumnya terjadi di daerah yang berbatasan dengan garis pantai dan lahan yang berada di sekitar muara sungai. Tanah hasil sedimentasi tersebut, sebagian besar dimanfaatkan sebagai areal tambak dan mangrove.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1. Penataan Kelembagaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan asas :

1. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
3. Efisiensi;
4. Efektivitas;
5. Pembagian habis tugas;
6. Rentang kendali;
7. Tata kerja yang jelas; dan
8. Fleksibilitas.

Dari hasil pemetaan kelembagaan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Pasuruan, terdapat beberapa Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kota Pasuruan, diantaranya :

Tabel 1.1 Urusan Berdasarkan Kewenangan Kota Pasuruan

No.	Urusan Pemerintahan Daerah
1.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Energi dan Sumber Daya Mineral
3.	Inspektorat
4.	Kearsipan

5.	Kebudayaan
6.	Kehutanan
7.	Kelautan dan Perikanan
8.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
9.	Kepemudaan dan Olahraga
10.	Pariwisata
11.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13.	Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14.	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.	Pendidikan
16.	Penelitian dan Pengembangan
17.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18.	Perdagangan
19.	Perencanaan
20.	Kesehatan
21.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
22.	Keuangan
23.	Komunikasi dan Informatika
24.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
25.	Lingkungan Hidup
26.	Pangan
27.	Perhubungan
28.	Perindustrian
29.	Perpustakaan
30.	Persandian
31.	Pertanahan
32.	Pertanian
33.	Perumahan dan Kawasan Permukiman
34.	Sosial
35.	Statistik
36.	Tenaga Kerja
37.	Transmigrasi

Dari sejumlah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pasuruan diatas, Pemerintah Kota Pasuruan melakukan pemetaan terhadap semua urusan untuk membentuk Perangkat Daerah yang mengampu urusan tersebut dengan pertimbangan asas-asas pembentukan Perangkat Daerah.

Dengan mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektifitas dalam pembentukan Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Pasuruan dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, membentuk Perangkat Daerah antara lain :

- a. Dinas Daerah
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 5. Dinas Sosial
 6. Dinas Tenaga Kerja
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
 8. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 10. Dinas Perhubungan
 11. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 13. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 15. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 17. Dinas Perikanan
 18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 19. Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Badan Daerah
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
 2. Badan Kepegawaian Daerah
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
 4. Badan Pendapatan Daerah
 - c. Sekretariat Daerah
 - d. Sekretariat DPRD
 - e. Inspektorat
 - f. Kecamatan
 - g. Perangkat Daerah yang tidak dirubah :
 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 3. RSUD Dr. R. Soedarsono

2. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk menjabarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintah yang diampu, maka disusunlah Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota mengenai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Secara umum Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

c. Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Dinas Daerah

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dinas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Badan Daerah

Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugasdukungan teknis sesuai denganlingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsipenunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

f. Kecamatan

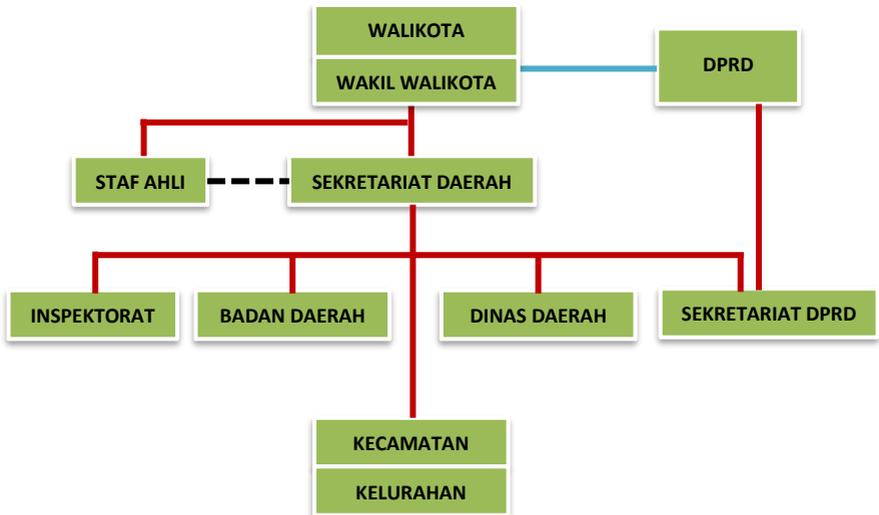
Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas antara lain :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Kecamatan. Kelurahan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan di Kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Susunan Organisasi Pemerintah Kota Pasuruan



Keterangan Garis :

- Garis Hubungan Kemitraan dan Pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD
- Garis Komando
- - - - - Garis Koordinasi

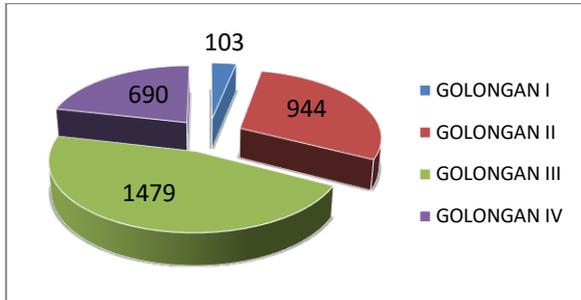
4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Kota Pasuruan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan kompetensi. Dalam pengelolaan data kepegawaian, Kota Pasuruan masih menggunakan aplikasi berbasis Desktop (SIMPEG) pada tahun 2017 dan akan menggunakan aplikasi berbasis Online (Si Maskot) pada tahun 2018.



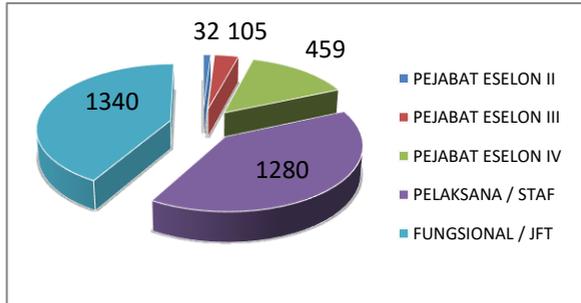
Adapun kondisi kepegawaian di Pemerintah Kota Pasuruan secara umum tergambar pada grafik dibawah ini :

Grifik 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2017



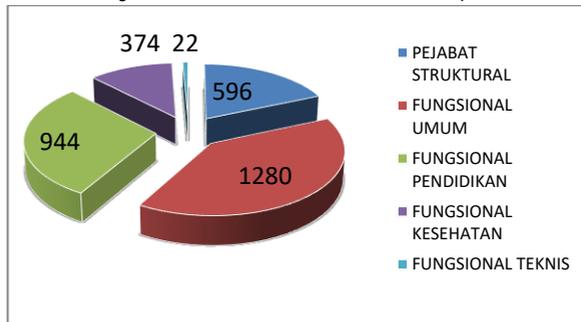
Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan

Grifik 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon per 31 Desember 2017



Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan

Grifik 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Jabatan per 31 Desember 2017



E. ISU STRATEGIS PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Sebagai sebuah wilayah yang menjadi bagian dari Propinsi Jawa Timur, selain berinteraksi dengan sesama daerah regional, Kota Pasuruan tidak menutup kemungkinan berinteraksi dengan dunia internasional. Keberadaan Kota Pasuruan juga tidak bisa terlepas dengan dinamika yang terjadi di dalam lingkungannya. Sehingga semua keadaan dalam negeri dan luar negeri akan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan Kota Pasuruan kedepan. Dari beberapa kondisi yang mempengaruhi perkembangan Kota Pasuruan terdapat isu-isu strategis yang perlu di selesaikan satu per satu, diantaranya :

1. Isu Pasar Tunggal
2. Isu Kemiskinan dan Pengangguran
3. Isu Pendidikan dan Kesehatan
4. Isu Lingkungan
5. Isu Infrastruktur
6. Isu Ekonomi Kreatif
7. Isu Reformasi Birokrasi
8. Isu Perlindungan Anak
9. Isu Perbaikan Layanan Kesehatan

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2017 terdiri dari 4 (Empat) BAB yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, gambaran singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah, Isu-isu Strategis yang dihadapi Pemerintah Kota Pasuruan serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2017 yang berdasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu tahun 2016-2017. Analisis capaian kinerja tahun 2017 antara lain dilakukan dengan membandingkan beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2017 dengan Standar Nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2016-2017 dan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan kerjanya di masa mendatang.



PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyalurkan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Berpedoman pada arah pembangunan daerah Kota Pasuruan, sebagaimana termuat dalam RPJPD Kota Pasuruan 2005–2025, berbagai keberhasilan dan permasalahan pembangunan periode 2010–2015 yang signifikan, isu-isu strategis dalam 5 tahun ke depan, 2016–2021, sekaligus untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka diperlukan upaya untuk mengakomodasi berbagai dinamika pembangunan untuk menuju Kota Pasuruan yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Untuk itu, perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan diarahkan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan 2016–2021, yakni:

Visi

**Kota Pasuruan lebih sejahtera, mandiri
dan berdaya saing dengan perdagangan, jasa dan industri**

Misi

- 1** Meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau
- 2** Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat
- 3** Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif
- 4** Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak
- 5** Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan
- 6** Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik
- 7** Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial

Tujuan dan Sasaran

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
MISI I Meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau	Mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dalam upaya membentuk generasi yang tangguh dan berkarakter	Meningkatnya keterjangkauan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas
		Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan terjangkau
		Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
MISI II Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam berperilaku dan hidup sehat	Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak
		Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal
		Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
MISI III Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif	Meningkatkan produktivitas dan akses masyarakat terhadap kehidupan yang layak untuk membangun keberdayaan sosial dan ekonomi	Menurunnya tingkat pengangguran
		Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis
		Menurunnya angka kemiskinan
		Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
		Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan
		Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB)
		Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga
		Meningkatnya nilai investasi dan jumlah izin yang diterbitkan
MISI IV Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak	Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif	Meningkatnya peran UMKM dan koperasi dalam perekonomian
		Meningkatnya kinerja perdagangan
		Meningkatnya upaya perlindungan konsumen
		Meningkatnya kinerja sektor industri, utamanya melalui pembinaan industri rumah tangga
		Meningkatnya kunjungan wisata yang disertai dengan perbaikan fasilitas pelayanan kepariwisataan
		Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan)
		Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat
		Meningkatnya penyerapan pangan
MISI V Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kinerja pelayanan jalan dan drainase
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak
		Meningkatnya upaya perlindungan kelestarian lingkungan hidup
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup
		Meningkatnya penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
MISI VI Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik	Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah Kota Pasuruan
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		Meningkatnya pengelolaan dan tertib kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
MISI VII Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial	Mengembangkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, untuk membangun harmoni sosial dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
		Terbangunnya suasana lingkungan yang aman dan tertib
		Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, yang didukung dengan ketanggapan penanggulangan bencana
		Meningkatnya upaya pelestarian artefak dan nilai-nilai budaya serta tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pasuruan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

MISI	TUJUAN	IKU	FORMULA
MISI I Meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau	Mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dalam upaya membentuk generasi yang tangguh dan berkarakter	Indeks pendidikan	$2/3 \text{ Indeks Lit} + 1/3 \text{ Indeks MYS}$ Indeks Lit = indeks literasi (melek huruf) Indeks MYS = Indeks rata-rata lama sekolah

<p>MISI II Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat</p>	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam berperilaku dan hidup sehat	Indeks kesehatan	Dihitung dengan Metode Brass dan Varian Trussel, dengan menggunakan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup yang dilaporkan dari tiap kelompok ibu-ibu umur 15-49 tahun
<p>MISI III Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif</p>	Meningkatkan produktivitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak untuk membangun keberdayaan sosial dan ekonomi	Tingkat kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}}$
		Tingkat pengangguran terbuka	$= 1 - \frac{\text{Angk Kerja yang Bekerja}}{\text{Angkatan Kerja}}$
		Indeks gini	$= 1 - \sum f_i (y_i + y_i - 1)$ <p>f_i = Jumlah persen pendapatan kelas ke-i y_i = Jumlah kumulatif persen pendapatan pada kelas ke-i</p>
<p>MISI IV Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak</p>	Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif	Pertumbuhan ekonomi	$\frac{\text{PDRB ADHB}_n - \text{PDRB ADHB}_{n-1}}{\text{PDRB ADHB}_{n-1}}$
<p>MISI V Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan</p>	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	$(\text{IPA} \times 30\%) + (\text{IPU} \times 30\%) + (\text{ITH} \times 40\%)$ <p>IPA = Indeks pencemaran air IPU = Indeks pencemaran udara ITH = Indeks tutupan lahan</p>

<p>MISI VI Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik</p>	<p>Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik</p>	<p>Indeks reformasi birokrasi</p>	<p>Indeks Reformasi Birokrasi</p>
<p>MISI VII Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial</p>	<p>Mengembangkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, untuk membangun harmoni sosial dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat</p>	<p>Indeks pembangunan manusia</p>	<p>$\frac{1}{3}$ (Indeks X1 + indeks X2 + Indeks X3) X1 = angka harapan hidup X2 = angka kombinasi angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah X3 = pengeluaran perkapita</p>

C. PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 disusun dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2017 telah ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2017 sebagaimana lampiran I dan telah dilakukan revisi dan perubahan pada tanggal 2 Nopember 2017 sehubungan adanya perubahan anggaran dan pergantian atau mutasi pejabat. Adapun Revisi Dan Perubahan Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA			
KINERJA TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN
1	2	3	4
Mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dalam upaya membentuk generasi yang tangguh dan berkarakter	Indeks pendidikan	85.44	85.44
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam berperilaku dan hidup sehat	Indeks kesehatan	70.13	70.13
Meningkatkan produktivitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak untuk membangun keberdayaan sosial dan ekonomi	Tingkat kemiskinan	7.22%	7.22%
	Tingkat pengangguran terbuka	6.03%	6.03%
	Indeks gini	0.3085	0.3085
Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif	Pertumbuhan ekonomi	5.96%	5.96%
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	59.24	59.24
Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi	40	40
Mengembangkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, untuk membangun harmoni sosial dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks pembangunan manusia	75.50	75.50
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN			
KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN
Meningkatnya keterjangkauan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas	Angka Partisipasi Kasar PAUD	82.23	82.23

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN
Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan terjangkau	Angka Rata-rata Lama Sekolah	9.92	9.92
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI + Paket A	100	100
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs + Paket B	81.56	81.56
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK + Paket C	74.07	74.07
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI + Paket A	100	100
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs + Paket B	99.39	99.39
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK + Paket C	99.22	99.22
	Angka kelulusan SD/MI	97.23	97.23
	Angka kelulusan SMP/MTs	99.13	99.13
	Angka kelulusan SMA/MA	99.19	99.19
	Persentase ruang kelas kondisi baik jenjang pendidikan SD/MI	79.49	79.49
	Persentase ruang kelas kondisi baik jenjang pendidikan SMP/MTs	86.58	86.58
	Persentase ruang kelas kondisi baik jenjang pendidikan SMA/MA	94.49	94.49

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN			
KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN
	Jumlah penambahan sekolah yang menyediakan pendidikan inklusi		
	- SD/MI	1	1
	- SMP/MTs	1	1
	- SMA/SMK/MA	1	1
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Kualifikasi Guru SD/MI menurut Ijazah \geq D4/S1	87.16	87.16
	Persentase Kualifikasi Guru SMP/MTs menurut Ijazah \geq D4/S1	95.34	95.34
	Persentase Kualifikasi Guru SMA/MA menurut Ijazah \geq D4/S1	97.44	97.44
	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD/MI bersertifikat pendidik	55.40	55.40
	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP/MTs bersertifikat pendidik	50.21	50.21
	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMA/MA/SMK bersertifikat pendidik	45.61	45.61
	Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak	Angka kematian ibu melahirkan	1.15
	Angka kematian bayi	8.46	8.46
	Angka balita gizi buruk per satuan balita	1.95	1.95

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN			
KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN
Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	Angka Harapan Hidup (AHH)	67.27	67.27
	Angka prevalensi penyakit TBC	279.99	279.99
	Angka prevalensi penyakit DBD	106.27	106.27
	Rasio puskesmas, poliklinik,ustu dan rumah bersalin per satuan penduduk	26.96	26.96
	Rasio dokter umum per satuan penduduk	27.99	27.99
	indeks kepuasan layanan masyarakat untuk layanan puskesmas	80.01	80.01
	indeks kepuasan layanan masyarakat untuk layanan RSUD	80.84	80.84
	Bed Occupancy Ratio RSUD	74.56	74.56
	Average Length of Stay RSUD	4.12	4.12
	Turn of Interval RSUD	1.21	1.21
	Gross Death Rate RSUD	42.56	42.56
	Nett Death Rate RSUD	24.19	24.19
	Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan	Persentase penduduk yang memiliki BPJS kesehatan	80.85
Menurunnya angka kemiskinan	Indeks kedalaman kemiskinan	1.16	1.16
	Indeks keparahan kemiskinan	0.26	0.26
Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan jumlah penduduk	4.89	4.89

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN			
KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN
Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat kesempatan kerja	93.97	93.97
Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Penurunan perkara perselisihan hubungan industrial	10	10
Meningkatnya nilai investasi dan jumlah izin yang diterbitkan	Pertumbuhan jumlah izin yang diterbitkan	10.40	10.40
	Pertumbuhan nilai investasi	22.29	22.29
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dlm pembangunan	Prosentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah	51.3	51.3
	Indeks pembangunan gender	96.48	96.48
	Indeks pemberdayaan gender	54.82	54.82
	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per satuan rumah tangga	12.07	12.07
Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga	Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	12	12
	Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat provinsi	25	25
	Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat nasional	8	8
Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB)	Total fertility rate (TFR)	2.08	2.08
Meningkatnya peran UMKM dan koperasi dalam perekonomian	Persentase pertumbuhan UKM	5.19	5.19
	Persentase koperasi aktif	56.38	56.38

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN			
KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN
Meningkatnya kinerja perdagangan	Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB	5,70	5,70
	Persentase pertumbuhan pedagang pasar tradisional	11.74	11.74
	Penambahan lokasi PKL yang disediakan dan ditata	1	1
	Paritas daya beli (purchasing power parity)	672,29	672,29
Meningkatnya upaya perlindungan konsumen	Pertumbuhan alat ukur, takar dan timbangan yang ditera ulang	7.87	7.87
	Pertumbuhan jenis barang dalam keadaan bungkus yang diawasi	27	27
	Persentase laporan keluhan konsumen yang ditindaklanjuti oleh BPSK	38.33	38.33
Meningkatnya kinerja sektor industri, utamanya melalui pembinaan industri rumah tangga	Pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB	5.55	5.55
	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	2.12	2.12
Meningkatnya kunjungan wisata yang disertai dengan perbaikan fasilitas pelayanan kepariwisataan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan yang berkunjung	8.26	8.26
	Jumlah destinasi wisata baru yang dikembangkan	1	1
Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan)	Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB	0,83	0,83

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN			
KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN
	Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB	0,02	0,02
	Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB	0,12	0,12
	Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	3,10	3,10
Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat	Ketersediaan Pangan: - Beras	116277.11	116277.11
	Ketersediaan protein perkapita (standar minimal 57 gr/hari)	56.95	56.95
	Ketersediaan energi per kapita (standar minimal 2.200 kkal/hari)	2469.83	2469.83
Meningkatnya penyerapan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	83.06	83.06
	Konsumsi protein perkapita (standar minimal 52 gr/hari)	62.57	62.57
	Konsumsi energi per kapita (standar minimal 2.000 kkal/hari)	2466.22	2466.22
Meningkatnya kinerja pelayanan jalan dan drainase	Persentase jalan dalam kondisi baik	65.59	65.59
	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	81.98	81.98
	Persentase drainase dalam kondisi baik	86.03	86.03
	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi lancar	91.77	91.77

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN			
KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN
Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak	Persentase rumah tangga berair bersih	82.64	82.64
	Persentase rumah tangga bersanitasi	89.23	89.23
	Persentase tingkat layanan persampahan	64.99	64.99
	Persentase luasan kawasan kumuh	12.65	12.65
Meningkatnya upaya perlindungan kelestarian lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Udara	74.80	74.80
	Indeks Pencemaran Air	45.14	45.14
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup	Jumlah bank sampah yang dibentuk setiap RW	173	173
Meningkatnya penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan	Persentase RTH	23.22	23.22
	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	82.79	82.79
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah Kota Pasuruan	Indeks reformasi birokrasi	40	40
	Opini BPK atas laporan keuangan daerah	WDP	WDP
	Nilai akuntabilitas kinerja	B	B
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	81.19	81.19
Meningkatnya pengelolaan dan tertib kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk ber-KTP	81.74	81.74
	Persentase bayi lahir ber-akta kelahiran	98.90	98.90
Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Jumlah konflik sosial berlatar belakang agama	0	0
Terbangunnya suasana lingkungan yang aman dan tertib	Jumlah kasus pelanggaran perda	524	524
	Angka Kriminalitas	26.86	26.86

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN
Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, yang didukung dengan ketanggapan penanggulangan bencana	Time response pemadaman kebakaran	15	15
	Time response penanggulangan bencana	15	15
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM dalam kerangka wawasan kebangsaan	Jumlah kasus pelanggaran HAM	0	0
Meningkatnya upaya pelestarian artefak dan nilai-nilai budaya serta tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial	Jumlah benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	18	18
	Jumlah kelompok seni dan budaya lokal yang aktif	149	149

D. PERENCANAAN ANGGARAN

Dalam perencanaan perubahan tahun 2017, Kota Pasuruan didukung oleh 421 Program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran awal sebesar Rp 937.362.111.587,- dan perubahan anggaran sebesar Rp 995.966.701.668,8,- atau meningkat sebesar 6.25%.



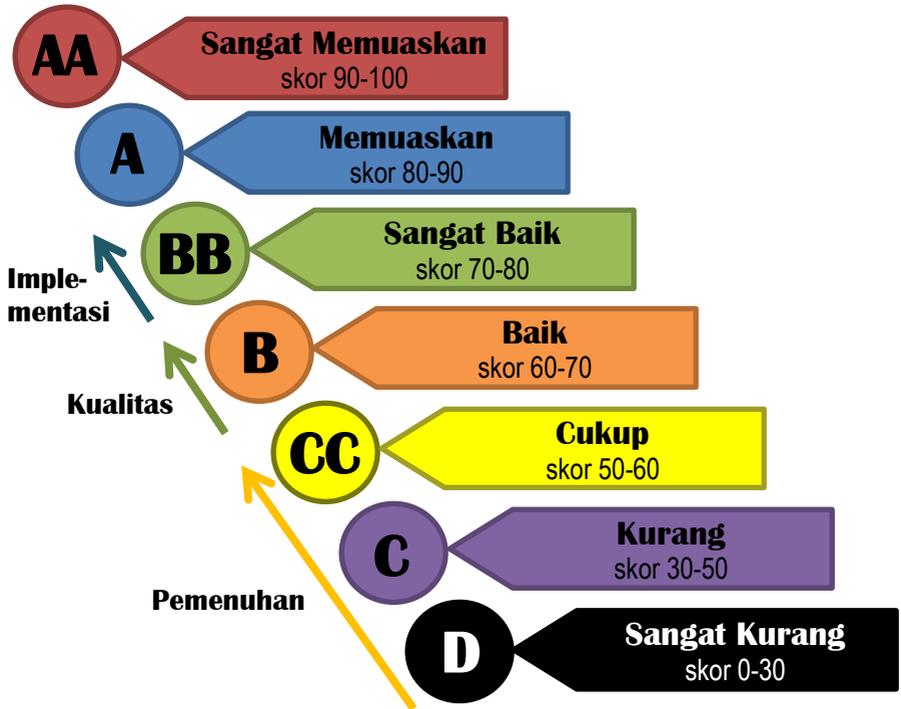
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Dalam pencapaian kinerja tahun 2017, Pemerintah Kota Pasuruan melakukan pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dengan membandingkan capaian masing-masing indikator kinerja antara target dan realisasi serta capaian tahun sebelumnya. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) didasarkan atas hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dalam suatu sasaran, yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja atas sasaran.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Pasuruan dilakukan secara berkala triwulanan dan tahunan. Sehubungan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tidak mengatur format pengukuran kinerja maka format Pengukuran Kinerja masih berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2017.

Nilai hasil akhir evaluasi LKjIP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat pada skema dibawah ini:



Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Pasuruan ini dibagi menjadi 2 (dua) fokus pembahasan, yaitu pembahasan pencapaian IKU ditingkat tujuan serta pembahasan pencapaian indikator tambahan ditingkat sasaran. Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Pasuruan pada Tahun 2017 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Analisis pencapaian Indikator Kinerja Utama :

Tabel 3.1. Realisasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pasuruan

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SATUAN	TARGET	REALISASI		(%)
				2016	2017	
Mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dalam upaya membentuk generasi yang tangguh dan berkarakter	Indeks pendidikan	indeks	85.44	85.17	85.98	101
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam berperilaku dan hidup sehat	Indeks kesehatan	indeks	70.13	70.91	71.11	101

Meningkatkan produktifitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak untuk membangun keberdayaan sosial dan ekonomi	Tingkat kemiskinan	%	7.22	7.62	7.53	96
	Tingkat pengangguran terbuka	%	6.03	5.86	5.60	93
	Indeks gini	Indeks	0.31	0.32	0.32	103
Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif	Pertumbuhan ekonomi	%	5.96	5.68	5.46	92
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	indeks	59.24	55.80	68.25	115
Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi	indeks	40	40	49.9	122
Mengembangkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, untuk membangun harmoni sosial dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.	Indeks pembangunan manusia	indeks	75.5	74.11	74.71	99

Adapun analisis capaian kinerja dari 7 (tujuh) tujuan Pemerintah Kota Pasuruan pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 “Mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dalam upaya membentuk generasi yang tangguh dan berkarakter”

Tujuan ini merupakan upaya mencapai Misi Pertama, yaitu “Meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau” dengan indikator dan analisa pencapaian sebagai berikut :

Indeks Pendidikan

Pendidikan adalah modal bangsa untuk pembangunan berkelanjutan. Makanya, investasi pendidikan merupakan kemutlakan bagi bangsa ini jika ke depan ingin sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya pendidikan harus dilakukan dengan kreatif dan inovatif. Untuk kepentingan ini maka perlu dikembangkanlah pendidikan *soft skill* selain menempa aspek *hard skill*-nya. Indeks Pendidikan merupakan salah satu elemen penting untuk mengetahui tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebuah daerah. Untuk itu diperlukan sinergi antara berbagai komponen agar tujuan pendidikan untuk mencetak manusia Indonesia yang professional dan paripurna akan dapat dicapai.

Kota Pasuruan dapat meningkatkan capaian indeks pendidikan yang pada tahun 2016 mencapai 85.17% meningkat pada tahun 2017 sebesar 85.98% atau meningkat sebesar 0.81%. Keberhasilan ini dikarenakan adanya integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, program ini berhasil meningkatkan
2. Program Pendidikan Masyarakat
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
4. Program Pendidikan Menengah
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 3.2.

Perbandingan Indeks Pendidikan Propinsi Jatim dan Kota Pasuruan

Tahun	Prov. Jatim	Kota Pasuruan
2013	0.57	0.67
2014	0.58	0.68
2015	0.59	0.68
2016	0.60	0.68
2017	0.60	0.68

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indeks pendidikan di Kota Pasuruan masih diatas capaian dari Propinsi Jawa Timur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini :

- Tingginya angka kelulusan PAUD
- Meningkatnya tingkat partisipasi dan angka kelulusan tingkat pendidikan dasar
- Mudahnya para peserta didik untuk mengakses sarana pendidikan

Hambatan/Masalah :

- Kurangnya daya tampung ditingkat PAUD sehingga masih banyak siswa yang tidak tertampung
- Pencapaian indikator terkait peserta didik SMA tidak bisa dikontrol lagi, dikarenakan beralihnya kewenangan daerah terkait pengelolaan urusan pendidikan SMA yang menjadi kewenangan Propinsi.
- Masih kurangnya kualitas pendidik, karena masih banyak yang belum memenuhi syarat minimal seorang pengajar (D-4/S-1)

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Mempermudah pengurusan ijin pendirian PAUD
- Memperbanyak sarana pendidikan PAUD
- Memperbanyak lagi even/lomba terkait pengembangan pendidikan untuk memperbesar kenaikan prestasi siswa di tingkat yang lebih tinggi lagi.
- Mempermudah ijin belajar bagi tenaga pengajar.

Agenda Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan Indeks Pendidikan, antara lain:



2. Tujuan 2 “Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam berperilaku dan hidup sehat”

Tujuan ini merupakan upaya mencapai Misi Kedua, yaitu “Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat” dengan indikator dan analisa pencapaian sebagai berikut :

Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan masyarakat Kota Pasuruan mengalami pertumbuhan yang positif mulai tahun 2014. Dari data Dinas Kesehatan Kota Pasuruan menunjukkan beberapa penurunan indikator kesehatan, seperti penurunan angka kematian ibu hamil, kematian bayi, hingga jumlah balita penderita gizi buruk.

Pada tahun 2017, Kota Pasuruan mendapatkan indeks kesehatan sebesar 71,11%, capaian ini meningkat dari tahun 2016 sebesar 70,91% atau meningkat sebesar 0.2%. Hal ini dikarenakan ada beberapa pencapaian antara lain : Jumlah kasus kematian ibu di Kota Pasuruan tahun 2017 sebanyak 5 kasus atau sebanyak 1,54% per 1.000 kelahiran hidup, Jumlah kasus kematian bayi di Kota Pasuruan tahun 2017 sebanyak 14 kasus atau sebesar 4,31 per 1.000 kelahiran hidup, dan Jumlah balita BGM di Kota Pasuruan tahun 2017 sebanyak 189 orang per 15.160 balita ditimbang atau sebanyak 1,2 per satuan balita.

Tabel 3.3.

Perbandingan Indeks Kesehatan Propinsi Jatim dan Kota Pasuruan

Tahun	Prov. Jatim	Kota Pasuruan
2013	75.62	69.58
2014	75.90	69.85
2015	75.90*	70.04
2016	75.90*	70.91
2017	75.90*	71.11

* Angka tahun terakhir dari BPS

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indeks kesehatan di Kota Pasuruan masih dibawah capaian dari Propinsi Jawa Timur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini :

- Mengaktifkan tim AMP/Analisis Maternal Perinatal dengan keputusan Walikota
- Meningkatkan upaya preventif dan promotif dengan cara pembinaan/penyuluhan calon pengantin kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama, Mengintensifkan kelas ibu hamil di Puskesmas, Pustu maupun Kelurahan dan meningkatkan peran kader dalam mendampingi bumil risti
- Pembiayaan Jampersal bagi ibu hamil risti

Hambatan/Masalah :

- Masih belum optimalnya kualitas layanan kesehatan
- Masih terbatasnya sarana prasarana atau fasilitas kesehatan
- Masih banyak warga tidak mampu yang belum tercover pelayanan kesehatan

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
- Menjamin ketersediaan tenaga medis dan paramedis
- Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan
- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan (akreditasi puskesmas)
- Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga tidak mampu

3. Tujuan 3 “Meningkatkan produktifitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak untuk membangun keberdayaan sosial dan ekonomi”

Tujuan ini merupakan upaya mencapai Misi Ketiga, yaitu “Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif” yang memiliki 3 (tiga) indikator kinerja dengan analisa pencapaian sebagai berikut :

Angka Kemiskinan

Adanya kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Ditahun 2017 angka capaian kemiskinan sebesar 7,53%. Angka ini menurun dibanding tahun 2016 yaitu sebesar 7,62% atau mengalami penurunan sebesar 0,09%.

Kota Pasuruan sangat komitmen dengan program pengentasan kemiskinan melalui strategi peningkatan pendapatan masyarakat dan menekan pengeluaran masyarakat miskin. Bentuk kegiatan antara lain pemberian santunan, jaminan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 3.4.

Perbandingan Angka Kemiskinan Tingkat Nasional, Propinsi Jatim dan Kota Pasuruan

Tahun	Nasional	Prov. Jatim	Kota Pasuruan
2013	11.47	12.73	7.57
2014	10.96	12.28	7.34
2015	11.13	12.28	7.47
2016	10.70	11.85	7.62
2017	10.12	11.20	7.53

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa angka kemiskinan di Kota Pasuruan masih diatas capaian dari Propinsi Jawa Timur dan Nasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini :

- Adanya program jaminan kesehatan gratis bagi warga miskin
- Adanya program sekolah gratis bagi anak keluarga miskin
- Banyak kegiatan yang bersifat pemberdayaan bagi masyarakat kurang mampu untuk bisa hidup mandiri
- Banyak kegiatan pemberian santunan maupun bantuan guna memperkecil pengeluaran bagi masyarakat miskin.

Hambatan/Masalah :

- Data penduduk miskin yang belum terintegrasi
- Kurangnya koordinasi antar dinas terkait usaha penurunan kemiskinan sehingga bantuan kurang tepat sasaran

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Mengintegrasikan semua data masyarakat miskin melalui “single database” yang memadukan beberapa data penduduk miskin dengan data kependudukan.
- Memperbanyak kegiatan yang bersifat pemberdayaan sehingga warga miskin bisa mandiri mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah memiliki kewajiban dalam memperkecil angka pengangguran. Untuk memenuhi amanat tersebut, Pemerintah Kota Pasuruan menyusun langkah yang terarah dan berkesinambungan. Langkah tersebut meliputi pelatihan bagi tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Pelatihan tenaga kerja bertujuan untuk mencetak tenaga kerja yang handal dan professional. Penempatan kerja bertujuan untuk menempatkan tenaga kerja dan mengisi kesempatan kerja sektor formal yang tersedia. Sedangkan perluasan kesempatan kerja bertujuan membekali tenaga kerja yang tidak terserap pasar kerja untuk dapat membuka usaha mandiri. Angka pengangguran terbuka ditetapkan target 6.03%. untuk indikator ini pada tahun 2017. Target tersebut dapat terlampaui. Angka pengangguran sebesar 6.43%. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 106.63%.

Tabel 3.5.

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Propinsi Jatim dan Kota Pasuruan

Tahun	Prov. Jatim	Kota Pasuruan
2014	4.19	6.09
2015	4.47	6.20
2016	4.21	6.35
2017	4.21*	6.60

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Pasuruan masih dibawah capaian dari Propinsi Jawa Timur dan Nasional.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

- Antusiasme dari tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan tenaga kerja dan kewirausahaan;
- Kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja yang tersedia;
- Penerapan Bursa Kerja Online yang memudahkan dan memperluas penyebaran informasi pasar kerja;
- Adanya pengembangan sistem informasi manajemen ketenagakerjaan dan ketransmigrasian bagi masyarakat;

Hambatan/masalah :

- Ada sebagian masyarakat yang pilih-pilih pekerjaan sehingga tidak semua angkatan kerja dapat diberikan pelatihan;
- Pencari kerja yang mau keluar daerah/pulau masih kecil;
- Masih adanya ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Memperkuat koordinasi dengan perusahaan penyedia lowongan kerja untuk memastikan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan;
- Meningkatkan penerapan Bursa Kerja Online;
- Mengadakan Job Fair
- Menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja

Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan sebuah daerah. Indeks Gini salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Standar penilaian ketimpangan Gini Ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut :

- GR < 0.4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah**
- 0.4 < GR < 0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)**
- GR > 0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi**

Indeks Gini Kota Pasuruan tahun 2017 sebesar 0.32 dari tahun 2013-2017 berada diangka 0.3, angka ini menunjukkan bahwa Kota Pasuruan memiliki tingkat ketimpangan yang relatif rendah. Akan tetapi angka ini merupakan peringatan dini untuk Kota Bandung agar bisa mengantisipasi kesenjangan distribusi pendapatan yang ada di kalangan masyarakatnya. Angka kesenjangan yang relatif tinggi dapat menyebabkan terjadinya kecemburuan-kecemburuan sosial diantara masyarakat, sehingga bisa menyebabkan adanya konflik sosial serta tindakan-tindakan kriminal lainnya.

Tabel 3.6.

Perbandingan Indeks Gini Propinsi Jatim dan Kota Pasuruan

Tahun	Prov. Jatim	Kota Pasuruan
2013	0.36	0.32
2014	0.37	0.31
2015	0.42	0.39
2016	0.42*	0.32
2017	0.42*	0.32

* Angka terakhir dari BPS

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indeks gini di Kota Pasuruan masih diatas capaian dari Propinsi Jawa Timur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini :

- Berkembangnya sektor-sektor niaga yang bisa menyerap tenaga kerja dan bisa menambah pendapatan masyarakat
- Relatif kondusifnya kondisi ekonomi sehingga konflik sosial bisa ditekan

Hambatan/Masalah :

- Pembangunan yang belum merata, khususnya daerah pesisir.
- Kultur masyarakat yang memandang pendidikan itu tidak penting, sehingga banyak anak usia sekolah yang membantu mencari nafkah orang tuanya.

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Pembangunan yang merata diseluruh wilayah Kota, pembangunan jalan lingkar utara (daerah pesisir)
- Mengaktifkan forum komunikasi masyarakat dengan pemerintah

4. Tujuan 4 “Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif”

Tujuan ini merupakan upaya mencapai Misi Keempat, yaitu “Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak” dengan indikator dan analisa pencapaian sebagai berikut :

Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengukuran BPS, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan dengan penambahan barang dan jasa disuatu wilayah. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB atas dasar harga konstan tahun tertentu. Untuk tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan tercapai sebesar 5,46% yang ditandai dengan peningkatan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan paling besar kontribusinya ditunjang oleh Sektor Perdagangan (27.96%) dan Sektor Industri Pengolahan (21.04%).

Tabel 3.7.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jatim dan Kota Pasuruan

Tahun	Prov. Jatim	Kota Pasuruan
2014	6.08	5.70
2015	5.44	5.53
2016	5.55	5.27
2017	5.60	5.46

* Angka terakhir dari BPS

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan masih dibawah capaian dari Propinsi Jawa Timur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini :

- Menurunnya inflasi daerah, karena ada beberapa kebijakan pemerintah yang sangat berperan, diantaranya kebijakan retribusi dan kebijakan jaminan sosial
- Perbaikan sarana infrastruktur yang cukup memadai

Hambatan/Masalah :

- Belum optimalnya penetapan target Pajak dan Retribusi Daerah karena keterbatasan data potensi yang dimiliki, serta belum up to date nya database potensi Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki
- Belum optimalnya komunikasi mitra kerja dengan SKPD terkait
- Masih lambatnya pemecahan permasalahan kerjasama terutama dalam pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah
- Menyusun kajian terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Melakukan study potensi pajak dan retribusi secara berkala
- Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pendapatan kepada SKPD pemungut
- Melakukan studi potensi untuk melangkapi data potensi yang dimiliki sebagai bahan acuan penentuan target pendapatan;
- Melakukan penjajagan kepada instansi terkait mengenai kemungkinan pembuatan sistem informasi pendapatan dan potensi daerah yang terintegrasi
- Mendorong instansi untuk menggunakan sistem informasi pendapatan
- Menyusun kajian terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

5. Tujuan 5 “Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”

Tujuan ini merupakan upaya mencapai Misi Kedua, yaitu “Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan” dengan indikator dan analisa pencapaian sebagai berikut :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup merupakan urusan yang diamanatkan Undang-Undang kepada pemerintah daerah. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kualitas lingkungan disuatu daerah. Ada 3 (tiga) indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup, diantaranya :

1. Indeks Pencemaran Air Sungai
2. Indeks Pencemaran Udara
3. Indeks Tutupan Lahan

Ketiga indikator diatas dianggap mempunyai tingkat kepentingan yang berbeda untuk setiap daerah dimana keseimbangan antar indikator tersebut mewakili *green issue* (isu hijau). Kota Pasuruan tahun 2016 mendapatkan IKLH sebesar 55.80 dan pada tahun 2017 sebesar 68.25, atau terjadi kenaikan capaian sebesar 122%. Adapun perbandingan tingkat capaian IKLH Kota Pasuruan dengan IKLH Popinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8.

Perbandingan IKLH Propinsi Jatim dan Kota Pasuruan

Tahun	Prov. Jatim	Kota Pasuruan
2015	56.25	54.67
2016	66.81	55.80
2017	66.81*	68.25

* Angka terakhir dari DLH propinsi

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa IKLH di Kota Pasuruan masih dibawah capaian dari Propinsi Jawa Timur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini :

- Bertambahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dibangun, sebagian besar adalah taman-taman yang bisa juga sebagai tempat rekreasi gratis bagi masyarakat Kota.
- Penerapan sekolah adi wiyata pada semua sekolah di wilayah Kota
- Dibentuknya Satgas Kebersihan yang bertugas menjaga dan meningkatkan kebersihan pada titik-titik Kota yang kotor
- Adanya pengolahan sampah secara terpadu

Hambatan/Masalah :

- Belum optimalnya pengelolaan sampah secara terpadu
- Terbatasnya tenaga SDM sehingga sering terjadi pengangkutan sampah di wilayah Kota
- Masih banyak kantor-kantor pemerintah yang belum menerapkan *ecco office*

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Pengawasan dan pemantauan kadungan air sungai dan udara guna mengetahui kualitas air dan udara di kawasan Kota secara berkala
- Pelaksanaan *Car Free Day* yang sangat mengurangi beban polusi Kota
- Pelaksanaan penanaman 1 juta pohon guna memperbanyak ruang terbuka hijau di wilayah Kota
- Pelaksanaan *ecco office* yang yang mengurangi penggunaan listrik melalui kebijakan Walikota

6. Tujuan 6 “Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik”

Tujuan ini merupakan upaya mencapai Misi Kedua, yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik” dengan indikator dan analisa pencapaian sebagai berikut :

Indeks Refomasi Birokrasi

Peningkatan capaian indeks reformasi birokrasi menggambarkan bahwa tata kelola pemerintahan semakin baik. Ada 3 (tiga) target yang dinilai dalam mengukur indeks reformasi birokrasi, yaitu: Pemerintahan yang efektif dan efisien, Pemerintahan yang bersih

dan akuntabel, serta Pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah Kota Pasuruan setahap demi setahap melaksanakan perbaikan pada 3 (tiga) komponen diatas, diantaranya melakukan penataan kelembagaan daerah yang sesuai dengan kewenangan daerah, tugas pokok dan fungsi, serta kebutuhan daerah, perlahan tapi pasti ada perbaikan disektor akuntabilitas kinerja semua Perangkat Daerah serta perbaikan kualitas pelayanan publik dengan adanya SOP dan Maklumat Pelayanan yang ditaati semua Unit Pelayanan Publik yang telah dibentuk. Pada tahun 2015 Kota Pasuruan melaksanakan evaluasi mandiri yang dilaksanakan oleh Inspektorat didapatkan nilai 36. Pada Tahun 2016 Kota Pasuruan mendapatkan nilai 40, sedangkan pada tahun 2017 naik menjadi 49.9 atau mengalami kenaikan 122% dari yang ditargetkan nilai 40.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini :

- Banyak Perangkat Daerah yang sudah memahami alur SAKIP, sehingga bisa meningkatkan kinerjanya
- Tugas Pokok dan Fungsi yang sudah berkualitas
- Pembentukan Unit Kerja yang sesuai kebutuhan daerah
- Terdapat SOP yang jelas dan menjawab kebutuhan masyarakat pada masing-masing Unit Pelayanan Publik

Hambatan/Masalah :

- Masih ada beberapa UPP yang tidak menjalankan prosedur sesuai SOPnya
- Masih ada beberapa Perangkat Daerah yang kesulitan menterjemahkan Tupoksinya sehingga perencanaannya kurang berkualitas
- Masih banyak Perangkat Daerah yang berbicara Output pada target kinerjanya

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Penerapan e-SAKIP guna menyingkronkan dan memperjelas kinerja Perangkat Daerah
- Integrasi database kinerja, mulai dari sektor perencanaan sampai sektor keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja
- *Refocusing* program pada perencanaan tahun selanjutnya, sehingga arah pembangunan akan lebih terfokus ditiap tahunnya

7. Tujuan 7 “Mengembangkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, untuk membangun harmoni sosial dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat”

Tujuan ini merupakan upaya mencapai Misi Kedua, yaitu “Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial” dengan indikator dan analisa pencapaian sebagai berikut :

Indeks Pembangunan Masyarakat

Hasil pengukuran BPS (angka harapan hidup; angka melek huruf; rata-rata lama sekolah; rata-rata pengeluaran riil perkapita), capaian untuk Kota Pasuruan belum mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar 74.11% dari yang ditargetkan sebesar 75.50%, dimana indeks pembangunan manusia di Kota Pasuruan terukur angka harapan hidup seiring dengan pembangunan fasilitas kesehatan, pengembangan jaminan kesehatan dan layanan kesehatan dan kualitas lingkungan hidup, di sektor pendidikan juga mengalami peningkatan yang ditandai dengan angka partisipasi sekolah dan angka melek huruf penduduk dewasa. Demikian juga Pendapatan masyarakat mengalami peningkatan seiring yang ditandai meningkatnya PDRB Kota Pasuruan. Berikut adalah perbandingan capaian IPM Kota Pasuruan dengan Propinsi Jawa Timur.

Tabel 3.9.

Perbandingan IPM Propinsi Jatim dan Kota Pasuruan

Tahun	Prov. Jatim	Kota Pasuruan
2013	67.55	72.89
2014	68.14	73.23
2015	68.95	73.78
2016	69.74	74.11
2017	69.74*	74.71

* Angka terakhir dari BPS

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa IPM di Kota Pasuruan masih diatas capaian dari Propinsi Jawa Timur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini :

- Adanya peningkatan sarana prasarana infrastruktur Kota, pembangunan taman-taman, Peningkatan jalan dan jembatan, serta sarana prasarana umum lainnya
- Adanya bantuan tambahan penghasilan bagi pengajar Madin atau TPQ

Hambatan/Masalah :

- Kultur dan pola pikir masyarakat pendidikan itu mahal
- Suku dan budaya yang ada begitu banyak sehingga rentan terjadi konflik berlatang belakang SARA

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Pelaksanaan program pendidikan gratis
- Pengembangan Madrasah Diniyah
- Memperbanyak forum komunikasi antara pemerintah, tokoh agama dan masyarakat

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Tambahan :

Tabel 3.10. Realisasi Indikator Kinerja Tambahan Pemerintah Kota Pasuruan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	%
Meningkatnya keterjangkauan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas	Angka Partisipasi Kasar PAUD	82.23	80.03	97.3
Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan terjangkau	Angka Rata-rata Lama Sekolah	9.92	9.10	91.7
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI + Paket A	100	94.84	94.8
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs + Paket B	81.56	83.57	102.5
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK + Paket C	74.07	-	-
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI + Paket A	100	104.72	104.7
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs + Paket B	99.39	101.68	102.3
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK + Paket C	99.22	-	-
	Angka kelulusan SD/MI	97.23	97.17	99.94
	Angka kelulusan SMP/MTs	99.13	97.85	987
	Angka kelulusan SMA/MA	99.19	-	-
	Persentase ruang kelas kondisi baik jenjang pendidikan SD/MI	79.49	80.52	101.3
	Persentase ruang kelas kondisi baik jenjang pendidikan SMP/MTs	86.58	84.29	97.35
	Persentase ruang kelas kondisi baik jenjang pendidikan SMA/MA	94.49	-	-
	Jumlah penambahan sekolah yang menyediakan pendidikan inklusi			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	%
	SD/MI	1	5	500
	SMP/MTs	1	9	900
	SMA/SMK/MA	1	-	-
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Kualifikasi Guru SD/MI menurut Ijazah \geq D4/S1	87.16	91.94	105.5
	Persentase Kualifikasi Guru SMP/MTs menurut Ijazah \geq D4/S1	95.34	95.36	100.02
	Persentase Kualifikasi Guru SMA/MA menurut Ijazah \geq D4/S1	97.44	-	-
	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD/MI bersertifikat pendidik	55.40	57.20	103.2
	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP/MTs bersertifikat pendidik	50.21	53.15	105.8
	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMA/MA/SMK bersertifikat pendidik	45.61	-	-
Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak	Angka kematian ibu melahirkan	1.15	1.54	71,67
	Angka kematian bayi	8.46	4.31	157,75
	Angka balita gizi buruk per satuan balita	1.95	1.2	166,67
Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	Angka Harapan Hidup (AHH)	67.27	70.87	105,4
	Angka prevalensi penyakit TBC	279.99	254	109,85
	Angka prevalensi penyakit DBD	106.27	61.71	141,93
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu dan rumah bersalin per satuan penduduk	26.96	24.20	89,76
	Rasio dokter umum per satuan penduduk	27.99	27.82	99
	indeks kepuasan layanan masyarakat untuk layanan puskesmas	80.01	80.03	100,2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	%
	indeks kepuasan layanan masyarakat untuk layanan RSUD	80.84	78.73	97.39
	Bed Occupancy Ratio RSUD	74.56	63.91	85.71
	Average Length of Stay RSUD	4.12	4.27	103.64
	Turn of Interval RSUD	1.21	1.91	157.85
	Gross Death Rate RSUD	42.56	29.83	-70.08
	Nett Death Rate RSUD	24.19	21.72	-89.79
Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan	Persentase penduduk yang memiliki BPJS kesehatan	80.85	57.9	72
Menurunnya angka kemiskinan	Indeks kedalaman kemiskinan	1.16	0.58	150
	Indeks keparahan kemiskinan	0.26	0.09	134.61
Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan jumlah penduduk	4.89	4.62	105.84
Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat kesempatan kerja	93.97	93	98.97
Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Penurunan perkara perselisihan hubungan industrial	10	11	110
Meningkatnya nilai investasi dan jumlah izin yang diterbitkan	Pertumbuhan jumlah izin yang diterbitkan	10.40	0.40	3.85
	Pertumbuhan nilai investasi	22.29	1.72	17.21

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	%
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dlm pembangunan	Prosentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah	51.3	51.09	99.6
	Indeks pembangunan gender	96.48	96.32	99.90
	Indeks pemberdayaan gender	54.82	57.85	105.53
	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per satuan rumah tangga	12.07	13.58	112.51
Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga	Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	12	6	50
	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat provinsi	25	184	736
	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional	8	60	750
Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB)	Total fertility rate (TFR)	2.08	2.05	98.56
Meningkatnya peran UMKM dan koperasi dalam perekonomian	Persentase pertumbuhan UKM	5.19	13.70	264
	Persentase koperasi aktif	56.38	34.4	61
Meningkatnya kinerja perdagangan	Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB	5.70	5.62	98.60
	Persentase pertumbuhan pedagang pasar tradisional	11.74	12.30	104.77
	Penambahan lokasi PKL yang disediakan dan ditata	1	1	100
	Paritas daya beli (purchasing power parity)	672,29	665.63	99.01

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	%
Meningkatnya upaya perlindungan konsumen	Pertumbuhan alat ukur, takar dan timbangan yang ditera ulang	7.87	7.30	92.76
	Pertumbuhan jenis barang dalam keadaan bungkus yang diawasi	27	27	100
	Persentase laporan keluhan konsumen yang ditindaklanjuti oleh BPSK	38.33	37.14	96.90
Meningkatnya kinerja sektor industri, utamanya melalui pembinaan industri rumah tangga	Pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB	5.55	5.83	105.05
	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	2.12	2.1	99
Meningkatnya kunjungan wisata yang disertai dengan perbaikan fasilitas pelayanan kepariwisataan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan yang berkunjung	8.26	2.53	31
	Jumlah destinasi wisata baru yang dikembangkan	1	3	300
Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan)	Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB	0.83	0.78	93.9
	Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB	0.02	0.019	95
	Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB	0.12	0.13	108.3
	Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	3.10	3.03	97.74

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	%
Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat	Ketersediaan Pangan: - Beras	17230	19662	113.8
	Ketersediaan protein perkapita (standar minimal 57 gr/hari)	56.95	63.74	111.82
	Ketersediaan energi per kapita (standar minimal 2.200 kkal/hari)	2200	2499	113.59
Meningkatnya penyerapan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	83.06	82.8	99.7
	Konsumsi protein perkapita (standar minimal 52 gr/hari)	62.57	65.02	103.9
	Konsumsi energi per kapita (standar minimal 2.000 kkal/hari)	2466.22	16373	663.9
Meningkatnya kinerja pelayanan jalan dan drainase	Persentase jalan dalam kondisi baik	65.59	84,58	128,95
	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	81.98	82,55	100,70
	Persentase drainase dalam kondisi baik	86.03	75,16	87,36
	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi lancar	91.77	87,28	95,10
Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak	Persentase rumah tangga berair bersih	82.64	84.12	101,79
	Persentase rumah tangga bersanitasi	89.23	90.31	101, 21
	Persentase tingkat layanan persampahan	64.99	89.12	137
	Persentase luasan kawasan kumuh	12.65	10,18	124,26

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	%
Meningkatnya upaya perlindungan kelestarian lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Udara	74.80	96.22	129
	Indeks Pencemaran Air	45.14	60	133
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup	Jumlah bank sampah yang dibentuk setiap RW	173	130	75.14
Meningkatnya penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan	Persentase RTH	23.22	16.57	71.36
	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	82.79	85.00	102.67
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah Kota Pasuruan	Indeks reformasi birokrasi	40	50	125
	Opini BPK atas laporan keuangan daerah	WDP	WTP	120
	Nilai akuntabilitas kinerja	B	B	100
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	81.19	75.77	93.3
Meningkatnya pengelolaan dan tertib kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk ber-KTP	81.74	96,67	118.3
	Persentase bayi lahir ber-akta kelahiran	98.90	100	101
Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Jumlah konflik sosial berlatar belakang agama	0	0	100
Terbangunnya suasana lingkungan yang aman dan tertib	Jumlah kasus pelanggaran perda	524	7	7485
	Angka kriminalitas	26.86	24.18	111
Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, yang didukung dengan ketanggapan penanggulangan bencana	Time response pemadaman kebakaran	15	14.00	93.33
	Time response penanggulangan bencana	15	14.00	93.33
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM dalam kerangka wawasan kebangsaan	Jumlah kasus pelanggaran HAM	0	0	100

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	%
Meningkatnya upaya pelestarian artefak dan nilai-nilai budaya serta tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial	Jumlah benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	18	18	100
	Jumlah kelompok seni dan budaya lokal yang aktif	149	149	100

Penjelasan pencapaian masing-masing Sasaran dan Indikator Kinerja Tambahan adalah sebagai berikut :

◆ Sasaran Strategis 1

“Meningkatnya keterjangkauan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas”

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “Meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau” dan juga untuk mencapai tujuan: “Mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dalam upaya membentuk generasi yang tangguh dan berkarakter”. Sasaran ini didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 1 (satu) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan keterjangkauan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas tersaji pada Tabel 3.11. berikut dibawah ini:

Tabel 3.11. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian 2017	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	82.23	81.09	80.03	97.3	84.56	94.6
Rata-rata capaian						97.3		
Kategori capaian						Sangat Memuaskan		

Pada tabel 3.11 terlihat capaian indikator partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebesar 97.3%. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan anak usia dini capaiannya belum 100 persen ini dikarenakan perbandingan siswa PAUD sebanyak 10.814 dengan penduduk Usia 3-6 Tahun sebanyak 13.513, ini masih belum semuanya tertampung di lembaga PAUD yang terdiri dari : TPA, SPS, KB dan TK. Untuk penduduk yang usianya 3-6 tahun itu banyak yang dimasukkan di lembaga PAUD, akan tetapi untuk anak usia yang dibawah 3-6 tahun itu belum semuanya tertampung di lembaga PAUD terutama pada lembaga TPA (Tempat Penitipan Anak) yang kebanyakan masih diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali untuk anak yang orang tuanya bekerja sehingga dimasukkan pada lembaga TPA.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

1. Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan anak usia dini terus dilakukan sampai ke tingkat kelurahan.
2. Pengembangan gugus sekolah TK/RA
3. Peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan melalui pembinaan dan pelatihan.

Hambatan/masalah :

1. Masih belum meratanya pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan anak usia dini terhadap pengembangan potensi anak

Strategi/upaya pemecahan masalah :

1. Sosialisasi untuk orang tua tidak bekerja tentang pentingnya pendidikan anak usia dini.
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini
3. Peningkatan Promosi/Gelar hasil prestasi pendidikan anak usia dini.

◆ Sasaran Strategis 2***"Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan terjangkau"***

Sasaran strategis 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau" dan juga untuk mencapai tujuan: "Mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dalam upaya membentuk generasi yang tangguh dan berkarakter". Sasaran ini didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 14 (empat belas) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan terjangkau tersaji pada Tabel 3.12. berikut dibawah ini:

Tabel 3.12. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian 2017	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9.92	9.08	9.10	91.7	12	75.8
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI + Paket A	%	100	93,59	94.84	94.8	100	94.84
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs + Paket B	%	81.56	81.01	83.57	102.5	89.32	93.56
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK + Paket C	%	74.07	93.80	-	-	78.62	-
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI + Paket A	%	100	101,64	104.72	104.7	100	104.7
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs + Paket B	%	99.39	102,70	101.68	102.3	99.79	101.89
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK + Paket C	%	99.22	121,93	-	-	99.62	-
8	Angka kelulusan SD/MI	%	97.23	96,77	97.17	99.94	97.42	99.74
9	Angka kelulusan SMP/MTs	%	99.13	95,52	97.85	98.7	99.33	98.5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian 2017	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
10	Angka kelulusan SMA/MA	%	99.19	98,02	-	-	99.39	-
11	Persentase ruang kelas kondisi baik jenjang pendidikan SD/MI	%	79.49	77,25	80.52	101.3	79.87	100.8
12	Persentase ruang kelas kondisi baik jenjang pendidikan SMP/MTs	%	86.58	83,86	84.29	97.35	86.89	97.0
13	Persentase ruang kelas kondisi baik jenjang pendidikan SMA/MA	%	94.49	94,12	-	-	94.76	-
14	Jumlah penambahan sekolah yang menyediakan pendidikan inklusi SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA	Unit	1	-	5	500	1	500
		Unit	1	-	9	900	1	900
		Unit	1	-	0	0	1	-
Rata-rata capaian						97.14		
Kategori capaian						Sangat Memuaskan		

*angka proyeksi

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Angka Rata-rata lama Sekolah di Kota Pasuruan baru tercapai 91,7% dari target capaian tahun 2017. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angkanya maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.
- Angka partisipasi kasar SD/ MI dan SMP/MTs, dimana indikator tersebut realisasinya sudah melebihi target sebesar 100%, berdasarkan peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah pada 5 tahun terakhir di Kota Pasuruan mencapai diatas 100 persen, patut diduga bahwa banyak yang bersekolah di SD umurnya diluar 7-12 tahun dan SMP umurnya diluar 13-15 tahun dan masih kurang dari 7 tahun untuk SD dan 13 tahun untuk SMP. APK menunjukkan tingkat partisipasi secara umum disuatu tingkat pendidikan. APK merupakan indkator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.
- Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs dalam dua tahun terkahir memperlihatkan kecenderungan yang meningkat. Tingginya angka kelulusan suatu jenjang pendidikan hendaknya diimbangi dengan penyediaan sarana pendidikan pada jenjang diatasnya. Penyediaan sarana ini sangat dimungkinkan untuk menampung mereka yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan dengan tingginya angka kelulusan pada jenjang pendidikan mencerminkan pendidikan yang baik dan merupakan kinerja utama dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Persentase ruang kelas kondisi baik jenjang pendidikan SD/MI sudah melampaui target sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs baru tercapai 97.35%. Untuk mengatasi masalah ini masih perlunya peningkatan infrastruktur untuk jenjang sekolah SMP/MTs
- Indikator yang terkait jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sudah bukan menjadi kewenangan pemerintah kab/kota lagi.
- Untuk indikator penambahan jumlah sekolah yang menyediakan pendidikan inklusi di Kota Pasuruan sudah melebihi target.

Tabel 3.13. Daftar Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi

No.	Sekolah	Status
1	UPT SDN Sekargadung	Negeri
2	SD Nurul Huda	Swasta
3	UPT SDN Bangilan	Negeri
4	UPT SDN Panggungrejo	Negeri
5	SD Al Irsyad	Swasta
6	UPT SDN Gadingrejo I	Negeri
7	UPT SDN Trajeng I	Negeri
8	UPT SDN Bukir	Negeri
9	UPT SDN Wirogunan	Negeri
10	UPT SMPN 6	Negeri
11	SMP Muhammadiyah	Swasta
12	SMP SabilulThoyyib	Swasta
13	UPT SMPN 2	Negeri
14	SMP Ma'arif	Swasta

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan

◆ Sasaran Strategis 3

"Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan"

Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau" dan juga untuk mencapai tujuan: "Mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dalam upaya membentuk generasi yang tangguh dan berkarakter". Sasaran ini didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 6 (enam) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan tersaji pada Tabel 3.14. berikut dibawah ini:

Tabel 3.14 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian 2017	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Persentase Kualifikasi Guru SD/MI menurut Ijazah \geq D4/S1	%	87.16	89.43	91.94	105.5	88.04	104.4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian 2017	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
2	Persentase Kualifikasi Guru SMP/MTs menurut Ijazah \geq D4/S1	%	95.34	94,44	95.36	100.02	100	95.36
3	Persentase Kualifikasi Guru SMA/MA menurut Ijazah \geq D4/S1	%	97.44	95,80	-	-	100	-
4	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD/MI bersertifikat pendidik	%	55.40	57,81	57.20	103.2	55.44	103.17
5	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP/MTs bersertifikat pendidik	%	50.21	51,06	53.15	105.8	50.25	105.7
6	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMA/MA/SMK bersertifikat pendidik	%	45.61	42,92	-	-	45.65	-
Rata-rata capaian						69.09		
Kategori capaian						Sangat Memuaskan		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

Untuk mendukung keberhasilan kinerja sasaran ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara konsisten melaksanakan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan beberapa kegiatan. Diantaranya adalah : Penyelenggaraan Ujian Kompetensi Awal (UKA) dan sertifikasi pendidik, Penilaian Angka Kredit (PAK), Seleksi dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi, Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SD, Seleksi Tenaga Pendidik PAUD Berprestasi

Hambatan/masalah :

Masih terdapat guru yang ijazah S1-nya tidak linier dengan mata pelajaran yang diampu. Sedangkan masalah untuk guru yang bersertifikasi yaitu : nilai UKG dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih kurang dari nilai yang ditentukan (nilai UKG minimal 65,5), tidak liniernya ijazah S1-nya dengan mata pelajaran yang diampu.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Memberi kesempatan para pengajar untuk menambah SDM dengan mempermudah pemberian ijin belajar
- Memberi kebijakan penyesuaian ijazah bagi pengajar yang memiliki ijazah D4/S1

◆ Sasaran Strategis 4

"Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak"

Sasaran strategis 4 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat" dan juga untuk mencapai tujuan: "Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam berperilaku dan hidup sehat". Sasaran ini didukung oleh Dinas Kesehatan. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 3 (tiga) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak tersaji pada Tabel 3.15. berikut dibawah ini:

Tabel 3.15 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Angka kematian ibu melahirkan	Per 1000 kelahiran	1.15	1.23	1.54	71.67	1.00	154
2	Angka kematian bayi	Per 1000 kelahiran	8.46	6.15	4.31	157.75	5.80	74
3	Angka balita gizi buruk per satuan balita	Per 1000 balita	1.95	2.40	1.25	166.67	1.46	86
Rata-rata Capaian						132.03		
Kategori Capaian						Sangat Memuaskan		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Meningkatnya pelayanan kesehatan anak, ibu dan balita

Hambatan/masalah :

- Pencegahan dan penanganan kegawatdaruratan terhadap kasus-kasus dengan resiko tinggi masih belum optimal baik dari segi kepatuhan ibu hamil dan keluarga, pendampingan ibu hamil yang resiko maupun ketersediaan tenaga anestesi yang stanby di RS.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Mengaktifkan tim Analisis Maternal Perinatal (AMP) dengan Peraturan Walikota
- Meningkatkan upaya preventif dan promotif, antara lain : pembinaan calon pengantin baru, mengintensifkan kelas ibu hamil di puskesmas, serta meningkatkan peran kader dalam mendampingi ibu hamil dengan resiko tinggi.
- Pembiayaan Jampersal bagi ibu hamil dengan resiko tinggi
- Revitalisasi Posyandu

◆ Sasaran Strategis 5

"Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal"

Sasaran strategis 5 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat" dan juga untuk mencapai tujuan: "Meningkatkan kualitas pelayanan

kehatan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam berperilaku dan hidup sehat". Sasaran ini didukung oleh Dinas Kesehatan. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 12 (dua belas) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal tersaji pada Tabel 3.16. berikut dibawah ini:

Tabel 3.16 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	67.27	66.79	70.87	105,4	68.62	103.3
2	Angka prevalensi penyakit TBC	Per 100.000 penduduk	279.99	321.0	254	109,85	187.82	135.2
3	Angka prevalensi penyakit DBD	Per 100.000 penduduk	106.27	165.6	61.71	141,93	88.39	69.8
4	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu dan rumah bersalin per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	26.96	25.50	24.20	89,76	29.76	81.3
5	Rasio dokter umum per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	27.99	33.64	27.82	99	31.99	87.0
6	indeks kepuasan layanan masyarakat untuk layanan puskesmas	indeks	80.01	80.00	80.03	100,2	81.13	98.6
7	indeks kepuasan layanan masyarakat untuk layanan RSUD	indeks	80.84	82.47	78.73	71,61	85.80	91.8
8	Bed Occupancy Ratio RSUD	%	74.56	71.73	63.91	85.71	87.06	73.41
9	Average Length of Stay RSUD	Hari	4.12	4.11	4.27	103.64	4.16	102.64
10	Turn of Interval RSUD	Hari	1.21	1.2	1.91	157.85	1.22	156.56
11	Gross Death Rate RSUD	%	42.56	43.98	29.83	-70.08	37.29	79.99
12	Nett Death Rate RSUD	%	24.19	24.74	21.72	-89.79	22.08	98.37
Rata-rata Capaian						102.06		
Kategori Capaian						Sangat Memuaskan		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di Kota Pasuruan
- Menurunnya temuan kasus penyakit menular
- Rata-rata capaian IKM pelayanan pada fasilitas kesehatan diatas 80%

Hambatan/masalah :

- Rasio fasilitas kesehatan yang masih kurang
- Kurangnya tenaga kesehatan yang berkompeten
- Kurangnya jumlah tenaga medis

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
- Meningkatkan ketersediaan tenaga medis dan paramedis
- Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan
- Menambah jumlah puskesmas yang terakreditasi

◆ Sasaran Strategis 6***"Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan"***

Sasaran strategis 6 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat" dan juga untuk mencapai tujuan: "Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam berperilaku dan hidup sehat". Sasaran ini didukung oleh Dinas Kesehatan. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 1 (satu) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan tersaji pada Tabel 3.17. berikut dibawah ini:

Tabel 3.17 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Persentase penduduk yang memiliki BPJS kesehatan	%	80.85	80.05	57.9	72	100	85.7
Rata-rata Capaian						72%		
Kategori Capaian						Sangat Baik		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Perbaikan pelayanan pasien BPJS

Hambatan/masalah :

- Kurangnya minat masyarakat terhadap keanggotaan BPJS
- Pola pikir masyarakat bahwa pelayanan pasien BPJS itu jelek

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Integrasi program pusat dengan program daerah, supaya mempermudah pelayanan kesehatan masyarakat
- Memperbanyak sosialisasi pentingnya dan manfaat menjadi peserta BPJS

◆ Sasaran Strategis 7

“Menurunnya tingkat pengangguran”

Sasaran strategis 7 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif” dan juga untuk mencapai tujuan: “Meningkatkan produktivitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak untuk membangun keberdayaan sosial dan ekonomi”. Sasaran ini didukung oleh Dinas Tenaga Kerja. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 1 (satu) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Menurunnya tingkat pengangguran tersaji pada Tabel 3.18. berikut dibawah ini:

Tabel 3.18. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Tingkat kesempatan kerja	%	93.97	93,88	93	98.87	94.08	99.8
Rata-rata Capaian						99.90		
Kategori Capaian						Sangat Memuaskan		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Meningkatnya perusahaan swasta yang bekerjasama dengan dinas tenaga kerja
- Tingginya minat perusahaan yang ikut dalam bursa kerja yang diadakan oleh pemerintah daerah

Hambatan/masalah :

- Kurangnya minat pencari kerja terhadap pelatihan-pelatihan kerja yang diadakan oleh pemerintah
- Kurangnya kualitas para pencari kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan
- Para pencari kerja yang pilih-pilih dalam mencari kerja

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Memperbanyak lagi even bursa kerja di daerah
- Menambah kerjasama-kerjasama dengan perusahaan pencari tenaga kerja
- Mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan
- Mengadakan sertifikasi keahlian yang bisa digunakan dalam proses perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan yang telah bekerjasama dengan pemerintah daerah

◆ Sasaran Strategis 8

“Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis”

Sasaran strategis 8 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif” dan juga untuk mencapai tujuan: “Meningkatkan produktivitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak untuk membangun keberdayaan sosial dan ekonomi”. Sasaran ini didukung oleh Dinas Tenaga Kerja. Untuk mengukur sasaran pertama

ini ada 1 (satu) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis tersaji pada Tabel 3.19. berikut dibawah ini:

Tabel 3.19 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Penurunan perkara perselisihan hubungan industrial	kasus	10	11	11	110	8	137.5
Rata-rata Capaian						110		
Kategori Capaian						Sangat Memuaskan		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Banyak perusahaan-perusahaan di wilayah Kota Pasuruan mengerti akan pentingnya penerapan peraturan mengenai ketenagakerjaan.

Hambatan/masalah :

- Masih ada beberapa perusahaan yang tidak mematuhi peraturan terkait UMR Kota

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Memperbanyak sosialisasi peraturan mengenai ketenagakerjaan ke semua perusahaan di wilayah Kota Pasuruan
- Melaksanakan forum-forum komunikasi antara pemilik usaha, asosiasi tenaga kerja dan pemerintah

◆ Sasaran Strategis 9

“Menurunnya angka kemiskinan”

Sasaran strategis 9 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif” dan juga untuk mencapai tujuan: “Meningkatkan produktivitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak untuk membangun keberdayaan sosial dan ekonomi”. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 2 (dua) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Menurunnya angka kemiskinan tersaji pada Tabel 3.20. berikut dibawah ini:

Tabel 3.20 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 9

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Indeks kedalaman kemiskinan	Indeks	1.16	1.29	0.58	150	1.13	51.3
2	Indeks keparahan kemiskinan	Indeks	0.26	0.32	0.09	134.61	0.25	36.0
Rata-rata Capaian						142.3		
Kategori Capaian						Sangat Memuaskan		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Banyak program Perangkat Daerah yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, berupa Pemberian Subsidi dan Pelayanan Gratis dibidang pendidikan dan kesehatan
- Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat miskin supaya bisa hidup mandiri

Hambatan/masalah :

- Banyak penggunaan bantuan untuk kebutuhan konsumtif, sehingga upaya perbaikan kondisi masyarakat miskin kurang maksimal
- Penggunaan data kemiskinan yang belum terintegrasi jadi satu, sehingga ada beberapa data kemiskinan yang *double* antara Perangkat Daerah pengampu program

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pasuruan
- Meningkatkan upaya meringankan beban hidup masyarakat miskin untuk mencukupi kebutuhan dasarnya
- Membuat data kemiskinan yang terintegrasi menjadi satu, sehingga mempermudah penyaluran bantuan

◆ Sasaran Strategis 10***"Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)"***

Sasaran strategis 10 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif" dan juga untuk mencapai tujuan: "Meningkatkan produktivitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak untuk membangun keberdayaan sosial dan ekonomi". Sasaran ini didukung oleh Dinas Sosial. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 1 (satu) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tersaji pada Tabel 3.21. berikut dibawah ini:

Tabel 3.21 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan jumlah penduduk	%	4.89	2,52	4.62	105.84	4.74	97.5
Rata-rata Capaian						105.84		
Kategori Capaian						Cukup		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Meningkatnya alokasi anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni
- Menurunnya jumlah PMKS Kota Pasuruan

Hambatan/masalah :

- Data Kemiskinan yang belum terintegrasi pada Perangkat Daerah bidang Sosial
- Masih banyak data PMKS yang belum terupdate

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Pengintegrasian data Kemiskinan pada semua Perangkat Daerah bidang Sosial
- Meningkatkan alokasi anggaran untuk penurunan PMKS Kota Pasuruan

◆ Sasaran Strategis 11***"Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan"***

Sasaran strategis 11 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif" dan juga untuk mencapai tujuan: "Meningkatkan produktivitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak untuk membangun keberdayaan sosial dan ekonomi". Sasaran ini didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 4 (empat) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan tersaji pada Tabel 3.22. berikut dibawah ini:

Tabel 3.22 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 11

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Prosentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah	%	51.30	43,25	51.09	99.6	51.71	98.8
2	Indeks pembangunan gender	Indeks	96.48	96,47	96.32	99.90	96.83	99.5
3	Indeks pemberdayaan gender	Indeks	54.82	57,85	57.85	105.53	57.50	100.6
4	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per satuan rumah tangga	Per 10.000 rumah tangga	12.07	13,58	13.58	112.51	9.63	141.0
Rata-rata Capaian						104.4		
Kategori Capaian						Sangat Memuaskan		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Kasus KDRT yang menurun
- Perbaikan dalam hal memperjuangkan hak anak

Hambatan/masalah :

- Legimitasi konstruksi budaya yang cenderung patriarki
- Ketidaktepatan interpretasi ajaran agama
- Kebijakan politik yang kurang mendukung persamaan gender

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Adanya sosialisasi dukungan perempuan di dunia politik;
- Adanya sosialisasi tentang perundangan Pengarus Utamaan Gender (PUG);
- Adanya pembinaan ekonomi produktif dan pembinaan organisasi perempuan;
- Memberikan pelatihan dan ketrampilan bagi perempuan korban kekerasan;
- Adanya sosialisasi PPT KDRT;
- Dibentuknya pos-pos PPT KDRT di kelurahan;
- Adanya sosialisasi Hak Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Adanya Forum Anak Tingkat Kota sampai dengan Tingkat Kelurahan

◆ Sasaran Strategis 12***"Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB)"***

Sasaran strategis 12 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif" dan juga untuk mencapai tujuan: "Meningkatkan produktivitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak untuk membangun keberdayaan sosial dan ekonomi". Sasaran ini didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 1 (satu) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB) tersaji pada Tabel 3.23. berikut dibawah ini:

Tabel 3.23. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 12

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Total fertility rate (TFR)	%	2.08	2.05	2.05	98.56	2.04	100.5
Rata-rata Capaian						98.56		
Kategori Capaian						Sangat Memuaskan		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Kota Pasuruan berhasil mempertahankan capaian TFR = 2, jadi rata-rata perempuan diwilayah Kota Pasuruan mempunyai anak sebanyak 2 anak
- Peserta aseptor KB yang semakin banyak peminatnya

Hambatan/masalah :

- Rendahnya kesertaan KB Pria karena masih adanya pendapat masyarakat bahwa KB hanya untuk kaum perempuan saja;
- Menurunnya rata-rata usia perkawinan karena masih adanya anggapan masyarakat untuk segera menikahkan anak perempuan setelah masa baligh sehingga tanggungjawab sebagai orang tua telah terpenuhi;
- Masih terbatasnya jumlah penyuluh KB karena banyaknya Penyuluh KB yang pensiun dan/atau pindah dari jabatan fungsional menjadi struktural;
- Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi karena pengetahuan masyarakat tentang KB dan alat kontrasepsi tidak diikuti perilaku untuk menjadi peserta KB karena khawatir dengan side-effect nya;
- Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah karena remaja anggota kelompok PIK-R/M berganti-ganti setiap tahun karena sudah lulus sekolah;
- Kualitas pelayanan KB belum sesuai standar berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan KB karena banyaknya sarana dan prasarana di Fasilitas Kesehatan yang sudah tidak layak pakai;
- Terbatasnya kualitas dan pengetahuan kader tentang materi program KKBPK karena pendidikan kader yang bervariasi;
- Kelompok BKB, BKR, dan BKL belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB karena kader kelompok mempunyai beban kerja tinggi karena tidak hanya mendukung program KB namun juga program-program Pemerintah lainnya;
- Belum optimalnya peran kelompok Tri Bina dalam peningkatan ketahanan keluarga karena Kelompok Tri Bina kurang aktif melakukan pembinaan;
- Belum optimalnya peran kelompok UPPKS dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga;

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Tersedianya Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN KB) untuk pelayanan KB MOP bagi pria;
- Adanya KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja bagi anggota PIK-R/M;
- Tambahan CPNS Penyuluh KB Baru tahun 2015 sebanyak 4 orang;
- Menyediakan alat dan obat kontrasepsi yang memadai;
- Dukungan pembinaan dan sosialisasi tidak hanya dari PD-KB juga instansi lainnya;
- Dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah untuk pengadaan sarana dan prasarana pelayanan KB;
- Kader yang tetap semangat mendukung program KB meskipun sudah usia lanjut;
- Jumlah kelompok BKB, BKR, dan BKL yang aktif meningkat setiap tahunnya;
- Jumlah kelompok Tri Bina yang dibentuk sudah cukup banyak;

◆ Sasaran Strategis 13

"Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga"

Sasaran strategis 13 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif" dan juga untuk mencapai tujuan: "Meningkatkan produktivitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak untuk membangun keberdayaan sosial dan ekonomi". Sasaran ini didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 3 (tiga) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga tersaji pada Tabel 3.24. berikut dibawah ini:

Tabel 3.24 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 13

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	Pemuda	12	9	6	50	24	25
2	Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat provinsi	Atlit	25	20	184	736	35	525.7
3	Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat nasional	Atlit	8	4	60	750	14	428.6
Rata-rata Capaian						507		
Kategori Capaian						Sangat Memuaskan		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Meningkatnya jumlah atlit yang berprestasi yang semula ditargetkan 8 atlit menjadi 60 atlit
- Sarana prasarana olahraga yang bertambah

Hambatan/masalah :

- Masih kurangnya ketersediaan sarana dan kesempatan bagi pemuda untuk mengekspresikan potensi positifnya.
- Masih kurangnya ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang layak, terutama untuk non-cabang olahraga populer.
- Masih minimnya upaya pembinaan atlet secara berjenjang, khususnya melalui sekolah.
- Masih kurangnya penghargaan dan apresiasi Pemerintah Kota terhadap atlit dan mantan atlit berprestasi.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Meningkatkan ketersediaan sarana dan kesempatan bagi pemuda dalam mengekspresikan potensi positif.
- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang layak.
- Meningkatkan pembinaan atlet secara berjenjang.
- Memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap atlit dan mantan yang berprestasi.

◆ Sasaran Strategis 14

"Meningkatnya nilai investasi dan jumlah izin yang diterbitkan"

Sasaran strategis 14 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif" dan juga untuk mencapai tujuan: "Meningkatkan produktivitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak untuk membangun keberdayaan sosial dan ekonomi". Sasaran ini didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 2 (dua) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya nilai investasi dan jumlah izin yang diterbitkan tersaji pada Tabel 3.25. berikut dibawah ini:

Tabel 3.25. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 14

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Pertumbuhan jumlah izin yang diterbitkan	%	10.40	14,43	0.40	3.85	11.62	127
2	Pertumbuhan nilai investasi	%	22.29	4,55	1.72	17.21	22.51	27
Rata-rata Capaian						10.5		
Kategori Capaian						Sangat Kurang		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan, dengan ditandai naiknya nilai SKM pelayanan

Hambatan/masalah :

- Turunnya jumlah ijin yang diterbitkan, karena berkurangnya pelayanan perijinan yang dilayani
- Terbatasnya personil yang mempunyai kapasitas penggunaan teknologi informasi yang berjalan sangat pesat khususnya pelayanan menggunakan online.
- Data terkait dengan potensi investasi maupun perizinan masih kurang akurat dan up to date sehingga hasil analisa dan kebijakan yang diambil kurang memadai
- Pertumbuhan realisasi investasi yang tidak signifikan dan perbaikan iklim penanaman modal yang berbasis pengelolaan sumberdaya lokal
- Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman pengusaha dan masyarakat untuk mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku di bidang penanaman modal dan perizinan

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Penambahan personil yang berkompeten dan meningkatkan SDM melalui kursus atau pelatihan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan.
- Secara rutin dokumen masterplan dan informasi data terkait informasi pelayanan perizinan secara up to date

- Evaluasi dan pemantauan serta mencari penyebabnya untuk dijadikan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kedepan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan investasi dan iklim usaha.
- Secara rutin perlu dilakukan monitoring dan sisir sehingga pengusaha dan masyarakat mengetahui peraturan dan ketentuan yang berlaku.

◆ Sasaran Strategis 15

"Meningkatnya peran UMKM dan koperasi dalam perekonomian"

Sasaran strategis 15 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak" dan juga untuk mencapai tujuan: " Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif". Sasaran ini didukung oleh Dinas Koperasi. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 2 (dua) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam perekonomian tersaji pada Tabel 3.26. berikut dibawah ini:

Tabel 3.26. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 15

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Persentase pertumbuhan UKM	%	5.19	8,95	13.70	264	5.31	258
2	Persentase koperasi aktif	%	56.38	33,03	34.4	61	56.56	61
Rata-rata Capaian						162.5		
Kategori Capaian						Sangat Memuaskan		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Meningkatkan jumlah volume usaha koperasi
- Meningkatkan jumlah koperasi aktif dari tahun 2016 sebanyak 109 menjadi 114 koperasi ditahun 2017

Hambatan/masalah :

- Masih banyak Koperasi yang belum memiliki pengetahuan tentang Tata Laksana Organisasi dan Kelembagaan koperasi dan dalam tertib Administrasi.
- Tingkat kemampuan pengelola koperasi yang masih rendah dalam menyusun rencana strategis dan pengembangan koperasi.
- Pengesahan Badan Hukum membutuhkan kerjasama dengan notaris (NPAK) yang melakukan proses sismin BHKop Ke Kemenkop.
- Kurang luasnya jaringan usaha dan relasi bisnis koperasi kota Pasuruan.
- Masih kurangnya Gelar Produk Unggulan Koperasi yang ada di Kota Pasuruan untuk menarik kerjasama dengan daerah lain.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Diperlukan penguatan jaringan koperasi di wilayah Kota Pasuruan.
- Monitoring dan Evaluasi dalam Pengawasan Lembaga Koperasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin.
- Mengoptimalkan perencanaan dalam Pendirian/Pengesahan Badan Hukum agar berjalan sesuai dengan peraturan perkoperasian pembuat Akta Koperasi.
- Pembinaan secara berkelanjutan diperlukan oleh kelompok Pra Koperasi untuk proses pendirian sampai pengesahan Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Meningkatkan kegiatan-kegiatan promosi produk unggulan koperasi Kota Pasuruan

◆ Sasaran Strategis 16***"Meningkatnya kinerja perdagangan"***

Sasaran strategis 16 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu " Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak" dan juga untuk mencapai tujuan: " Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif". Sasaran ini didukung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 4 (empat) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya kinerja perdagangan pada Tabel 3.27. berikut dibawah ini:

Tabel 3.27. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 16

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB	%	5.70	5,62	5.62	98.60	6.24	90
2	Persentase pertumbuhan pedagang pasar tradisional	Pedagang	11.74	12,30	3.06	26	20.54	74
3	Penambahan lokasi PKL yang disediakan dan ditata	Lokasi	1	-	1	100	1	100
4	Paritas daya beli (purchasing power parity)	Rp. Ribu	672.29	665,63	665.63	99.01	688.57	97
Rata-rata Capaian						81		
Kategori Capaian						Memuaskan		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Meningkatnya jumlah usaha perdagangan dan jasa
- Bertambahnya lokasi PKL didaerah alun-alun sehingga lebih tertata

Hambatan/masalah :

- Adanya memutakhirkan data pelaku usaha
- Tempat yang disediakan untuk relokasi PKL tidak memenuhi syarat dan representatif sehingga konsumen tidak berminat ke lokasi yang disediakan.
- Perilaku para PKL yang cenderung tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku (melanggar).
- Perlu disediakan tempat yang representatif untuk sentral PKL sehingga minat masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota pasuruan meningkat.
- Tidak tersedia tempat yang representatif untuk merelokasi sementara bagi pedagang yang terdampak atas pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi tersebut, yaitu sebanyak 200 pedagang sedangkan apabila biaya relokasi akan dibebankan kepada para pedagang pasar, maka hal ini rentan terhadap timbulnya permasalahan dan akan memakan waktu yang cukup lama.
- Data Pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang belum valid sehingga menyulitkan dalam pembinaan.
- Kurangnya Antusias Pelaku Usaha Kecil dan Menengah terhadap Program Pemerintah.
- Masih enggan para pelaku usaha dari Kota Pasuruan untuk melaporkan kegiatan pameran / temu usaha / kontak dagang yang telah difasilitasi oleh Diskoperindag Kota Pasuruan.
- Masih minimnya laporan transaksi impor dari perusahaan-perusahaan impor di Kota Pasuruan.
- Masih enggan para pelaku usaha potensi ekspor untuk mengurus legalitas usahanya guna mendukung pasar global.
- Masih kurangnya kemandirian UKM-IKM Kota Pasuruan untuk mengikuti even pameran di tingkat lokal/regional/nasional.
- Masih belum pahamnya masyarakat Kota Pasuruan dalam hal ini konsumen, tentang konsumen cerdas yang teliti sebelum membeli.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Perlu menambah jumlah kawasan yang dilegalkan untuk penampungan PKL.
- Perlunya dibangun/disediakan sentra-sentra (pengklasifikasian jenis produk) yang menampung potensi para PKL.
- Perlunya regulasi yang mengatur tentang penataan pedagang kaki lima dan kawasannya.
- Mengusulkan ulang Dana Alokasi Khusus Tahun 2018 dan Menganggarkan biaya relokasi untuk 200 pedagang di tahun 2018.
- Melakukan pencarian dan menetapkan lahan/tempat presentatif yang bersifat sementara guna bisa merelokasi dan mampu menampung 200 pedagang selama revitalisasi pasar berlangsung.

- Berupaya mendorong dan berkomunikasi secara intensif terhadap para pelaku usaha yang sudah melakukan kegiatan pameran produk unggulan/misi dagang ataupun kontak dagang.
- Mendorong dan berkoordinasi secara intensif terhadap perusahaan-perusahaan impor di Kota Pasuruan terkait nilai impor yang mempengaruhi tingkat PDRB Kota Pasuruan.
- Mendorong para pelaku usaha untuk berupaya melengkapi legalitas usahanya dengan memberikan kemudahan-kemudahan pengurusan perizinan di kantor DPMPSTP Kota Pasuruan.
- Berupaya mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat dan para pelaku usaha tentang “Konsumen Cerdas” terkait dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta berkoordinasi dengan jajaran samping Polresta /satgaspanbersama OPD yang berkompeten.
- Membangun gedung UPT Metrologi Legal dan meningkatkan kualitas SDM kemetrologian serta peralatan dan standart metrologi guna memaksimalkan pelayanan tera dan tera ulang sendiri tanpa kerjasama dengan daerah lain

◆ Sasaran Strategis 17

“Meningkatnya upaya perlindungan konsumen”

Sasaran strategis 17 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak” dan juga untuk mencapai tujuan: “Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif”. Sasaran ini didukung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 3 (tiga) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan upaya perlindungan konsumen tersaji pada Tabel 3.28. berikut dibawah ini:

Tabel 3.28. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 17

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Pertumbuhan alat ukur, takar dan timbangan yang ditera ulang	%	7.87	7.30	7.30	92.76	8.26	88
2	Pertumbuhan jenis barang dalam keadaan bungkus yang diawasi	Jenis	27	-	-	0	31	0
3	Persentase laporan keluhan konsumen yang ditindaklanjuti oleh BPSK	%	38.33	37.14	37.14	96.90	50.67	73.3
Rata-rata Capaian						63.22		
Kategori Capaian						Baik		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Meningkatnya jumlah keluhan konsumen yang tertangani BPSK

Hambatan/masalah :

- Belum optimalnya UPT Metrologi
- Belum optimalnya pengawasan barang dalam bungkus

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Mengoptimalkan kinerja UPT Metrologi
- Menambah tenaga fungsional kemetrolgian
- Mengoptimalkan pengawasan semua barang yang beredar

◆ Sasaran Strategis 18***"Meningkatnya kinerja sektor industri, utamanya melalui pembinaan industri rumah tangga"***

Sasaran strategis 18 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak" dan juga untuk mencapai tujuan: "Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif". Sasaran ini didukung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 2 (dua) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan kinerja sektor industri, utamanya melalui pembinaan industri rumah tangga tersaji pada Tabel 3.29. berikut dibawah ini:

Tabel 2.29. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 18

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB	%	5.55	5.83	5.83	105.05	5.91	99
2	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	%	2.12	2.40	2.1	99	2.25	93
Rata-rata Capaian						102		
Kategori Capaian						Sangat Memuaskan		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Bertambahnya jumlah usaha industri kecil dan menengah, yang semula 3906 ditahun 2016 menjadi 3989 ditahun 2017

Hambatan/masalah :

- Industri Mebel Kota Pasuruan dihadapkan pada kendala utama berupa mahalnya harga kayu. Disamping itu industri kecil dan menengah mebel juga mengalami permasalahan tentang teknik produksi (ukir dan desain hingga finishing produk), pengembangan

jaringan pemasaran, serta minimnya modal yang membuat mereka cenderung menjual barang setengah jadi dengan margin laba yang rendah.

- Industri logam dihadapkan pada kendala berupa standarisasi produk dan variasi produk, sehingga sulit bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar penjual produk. Pengrajin logam masih berkecenderungan melayani pesanan (sub kontrak) produk setengah jadi dari pabrikan besar, sehingga margin keuntungan yang didapatkan relatif rendah.
- Industri makanan dan minuman dihadapkan pada kendala desain kemasan dan labelisasi produk.
- Sulitnya menggeser pola pikir pelaku IKM terhadap program-program pendampingan. Mereka cenderung berorientasi pada pemberian bantuan (baik uang maupun alat) oleh Pemerintah.
- Masih kurang efektifnya pemantauan dan keberlanjutan program-program pendampingan pada IKM.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Perlunya upaya koordinasi dengan berbagai pihak, untuk meminimalisir dampak mahalnya harga kayu yaitu dengan memberikan akses informasi lelang kayu Perhutani serta pembelian secara on line via www.tokoperhutani.com. Disamping itu juga perlu diintensifkan pendampingan kepada pelaku usaha mebel baik peningkatan kualitas produk, modal maupun pemasaran.
- Perlu dilakukan upaya fasilitasi sertifikasi standar produk logam dan peningkatan variasi produk serta peningkatan jaringan pemasaran.
- Perlu dilakukan fasilitas desain kemasan dan labelisasi produk.
- Perlu dilakukan pendampingan intensif, melalui klinik bisnis, untuk mengubah pola pikir masyarakat sekaligus membentuk kemandirian usaha masyarakat.
- Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program pendampingan IKM.

◆ Sasaran Strategis 19

"Meningkatnya kunjungan wisata yang disertai dengan perbaikan fasilitas pelayanan kepariwisataan"

Sasaran strategis 19 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu " Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak" dan juga untuk mencapai tujuan: " Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif". Sasaran ini didukung oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 2 (dua) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya kunjungan wisata yang disertai dengan perbaikan fasilitas pelayanan kepariwisataan tersaji pada Tabel 3.30. berikut dibawah ini:

Tabel 3.30. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 19

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan yang berkunjung	Wisatawan	8.26	12	2.53	31	9.12	155
2	Jumlah destinasi wisata baru yang dikembangkan	Unit	1	-	3	300	1	300
Rata-rata Capaian						165.5		
Kategori Capaian						Sangat Memuaskan		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Bertambahnya jumlah wisatawan ke Kota Pasuruan (± 453.043 Wisatawan)
- Bertambahnya destinasi wisata baru di Kota Pasuruan (Taman, Jam Agung, dll)

Hambatan/masalah :

- Masih kurangnya Publikasi atau mempromosikan setiap event pariwisata yang dilaksanakan di Kota Pasuruan kepada daerah lain atau luar Kota untuk bisa mengunjungi event pariwisata tersebut.
- Perlunya optimalisasi suatu peningkatan event seni dan budaya supaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Pasuruan.
- Perlunya upaya untuk meningkatkan jumlah destinasi yang ada di Kota Pasuruan.
- Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional Bidang kepariwisataan

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Perlu adanya koordinasi antara pihak penyelenggara event dengan pihak media cetak dan elektronik dalam meningkatkan promosi kegiatan event di Kota Pasuruan.
- Menjalin komunikasi dan koordinasi antara pelaku wisata dengan pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan seni dan budaya yang diharapkan akan meningkat animo masyarakat hadir di Kota Pasuruan.
- Tercukupinya obyek wisata (Destinasi) akan berdampak positif dalam pengembangan bidang sosial, ekonomi dan budaya yang ada di Kota Pasuruan
- Perlu terwujudnya pembangunan secara fisik maupun non fisik dalam sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional Bidang kepariwisataan

◆ Sasaran Strategis 20

“Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan)”

Sasaran strategis 20 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “ Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak” dan juga untuk

mencapai tujuan: " Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif". Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 4 (empat) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) tersaji pada Tabel 3.31. berikut dibawah ini:

Tabel 3.31. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 20

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB	%	0.83	0.87	0.87	104.82	0.87	100
2	Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB	%	0.02	0.002	0.002	10.00	0.06	3.3
3	Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB	%	0.12	0.08	0.08	66.67	0.17	47.1
4	Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	3.10	3.03	3.03	97.74	3.20	94.7
Rata-rata Capaian						70		
Kategori Capaian						Sangat Baik		

Hambatan/masalah :

- Belum optimalnya inovasi dan pemanfaatan teknologi terapan dalam mendongkrak produktivitas pertanian.
- Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur pertanian.
- Rendahnya populasi ternak.
- Belum optimalnya pemanfaatan RPH Blandongan

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Mengoptimalkan pemanfaatan serta inovasi teknologi terapan dalam meningkatkan produksi pertanian.
- Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur pertanian.
- Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap kelompok peternak.
- Mengoptimalkan pemanfaatan RPH dalam sebagai RPH modern

◆ Sasaran Strategis 21**"Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat"**

Sasaran strategis 21 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu " Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak" dan juga untuk

mencapai tujuan: " Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif". Sasaran ini didukung oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 3 (tiga) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat tersaji pada Tabel 3.32. berikut dibawah ini:

Tabel 3.32. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 21

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Ketersediaan Pangan: Beras	Ton/ tahun	17230	11606 3.00	19662	113.8	118620. 15	97.8
2	Ketersediaan protein perkapita (standar minimal 57 gr/hari)	Gr/kap/h ari	56.95	125.96	63.74	111.82	57.45	219.3
3	Ketersediaan energi per kapita (standar minimal 2.200 kkal/hari)	Kkal/kap /hari	2200	2255.0 0	2499	113.59	2491.64	90.5
Rata-rata Capaian						113.07		
Kategori Capaian						Sangat Memuaskan		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Secara kuantitas jumlah energi yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk wilayah Kota Pasuruan tahun 2017 yaitu 2.499 kkal/kap/hari sudah diatas standar ideal 2.200 kkal/kap/hari
- Ketersediaan protein yang mencapai tingkat kecukupan sebesar 63,74 gr/kap/hari hampir sama dengan angka standar 57 gr/kap/hari

Hambatan/masalah :

- Dampak anomali iklim semakin sulit diprediksi, berpotensi menimbulkan ketidakpastian produksi semakin besar (gagal panen, banjir,meningkatnya serangan hama penyakit, kemarau panjang) dan kejadian kerawanan pangan transien semakin sering (bencana).
- Pertumbuhan penduduk yang cukup besar akan berdampak pada peningkatan kebutuhan konsumsi
- Sistem monitoring dan informasi pangan belum berjalan secara optimal.
- Sistem cadangan pangan, logistik dan distribusi pangan belum berjalan secara efisien
- Konsumsi pangan masyarakat masih tergantung pada beras dan terigu
- Kurang berkembangnya pangan lokal
- Agroindustri bidang pangan belum berkembang
- Berkembangnya produk pangan-pangan olahan yang tidak aman
- Belum berjalan secara maksimal Dewan Ketahanan Pangan
- Sinergitas penanganan ketahanan pangan masih berjalan sendiri-sendiri belum dilakukan secara terpadu
- Belum efektifnya kelembagaan penyuluhan pertanian

- POKMAS, GAPOKTAN belum berperan secara optimal
- Belum efektifnya peran lumbung desa

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Memantapkan ketersediaan pangan secara mandiri dan berkelanjutan
- Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga

◆ Sasaran Strategis 22

“Meningkatnya penyerapan pangan”

Sasaran strategis 22 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak” dan juga untuk mencapai tujuan: “Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif”. Sasaran ini didukung oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 3 (tiga) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya penyerapan pangan tersaji pada Tabel 3.33. berikut dibawah ini:

Tabel 3.33. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 22

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Indeks	83.06	83.99	82.8	99.7	83.80	98.8
2	Konsumsi protein perkapita (standar minimal 52 gr/hari)	Gr/kap/hari	62.57	59.00	65.02	103.9	63.13	103
3	Konsumsi energi per kapita (standar minimal 2.000 kkal/hari)	Kkal/kap/hari	2466.2 2	2015.5	16373	663.9	2487.99	658.1
Rata-rata Capaian						289.2		
Kategori Capaian						Sangat Memuaskan		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Keanekaragaman pangan di Kota Pasuruan yang meningkat, hal ini didukung adanya lomba-lomba cipta menu dari bahan umbi-umbian
- Tingkat konsumsi protein yang melebihi batas minimal 57 gr/kap/hari

Hambatan/masalah :

- Masih tingginya ketergantungan pangan masyarakat terhadap beras

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Memperbanyak pelatihan pembuatan pangan baru dengan bahan umbi-umbian

◆ Sasaran Strategis 23

"Meningkatnya kinerja pelayanan jalan dan drainase"

Sasaran strategis 23 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan" dan juga untuk mencapai tujuan: "Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan". Sasaran ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 4 (empat) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan kinerja pelayanan jalan dan drainase tersaji pada Tabel 3.34. berikut dibawah ini:

Tabel 3.34. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 23

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	65.59	67.90	84,58	128,95	69.62	97.5
2	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	%	81.98	83.19	82,55	100.70	84.09	98.9
3	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	86.03	60.00	75,16	87,36	86.96	69.0
4	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi lancar	%	91.77	74.00	87,28	95,10	92.76	79.8
Rata-rata Capaian						103		
Kategori Capaian						Sangat Memuaskan		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Terpeliharanya 25 ruas jalan di wilayah Kota Pasuruan
- Terbangunnya beberapa ruas drainase
- Ter-updatenya peta garis Kota Pasuruan

Hambatan/masalah :

- Pertambahan kapasitas jalan, utamanya jalan kota dan jalang lingkungan, yang tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor
- Masih kurangnya kualitas jalan.
- Belum optimalnya pemeliharaan saluran air dan penyediaan resapan air hujan, sebagai bagian mitigasi banjir.
- Belum optimalnya penanganan genangan banjir.
- Tingginya laju alih fungsi lahan pada sawah/irigasi teknis

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Melakukan perencanaan penambahan kapasitas akses jalan baru.
- Melakukan pemeliharaan dan peningkatan jalan
- Melaksanakan pemeliharaan dan normalisasi terhadap saluran air dan penyediaan resapan air hujan secara berkala.
- Melaksanakan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan terkait dengan penanganan banjir.
- Meningkatkan fungsi pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.

◆ Sasaran Strategis 24***"Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak"***

Sasaran strategis 24 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan" dan juga untuk mencapai tujuan: "Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan". Sasaran ini didukung oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 4 (empat) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak tersaji pada Tabel 3.35. berikut dibawah ini:

Tabel 3.35. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 24

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Persentase rumah tangga berair bersih	%	82.64	73.42	82.64	84.12	100	82.6
2	Persentase rumah tangga bersanitasi	%	89.23	86.42	89.23	90.31	100	89.2
3	Persentase tingkat layanan persampahan	%	64.99	27.25	64.99	89.12	69.14	94
4	Persentase luasan kawasan kumuh	%	12.65	27.25	10,18	124,26	0	0
Rata-rata Capaian						96.95		
Kategori Capaian						Baik		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat melalui program pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Sekolah Lapangan, serta didukung adanya program yang saling berkesinambungan dari beberapa Perangkat Daerah (PD) terkait penanganan kegiatan sanitasi sehingga arahan dan prioritas pembangunan bisa tercapai dan tepat sasaran
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki lingkungan yang bersih dan sehat, hal tersebut dibuktikan dengan adanya keterlibatan masyarakat mulai proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan

Hambatan/masalah :

- Masih adanya pengembang perumahan yang belum menyerahkan PSU-nya kepada Pemerintah Kota.
- Pertumbuhan penyediaan makam yang tidak sebanding dengan penambahan penduduk.
- Masih adanya rumah tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait bersama pengembang perumahan agar segera menyerahkan PSU-nya kepada Pemerintah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyediakan areal makam baru.
- Melakukan koordinasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mengajukan usulan rusunawa, BSPS ataupun RTLH demi peningkatan ketersediaan rumah layak huni, dan penanganan kawasan kumuh

◆ Sasaran Strategis 25***"Meningkatnya upaya perlindungan kelestarian lingkungan hidup"***

Sasaran strategis 25 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan" dan juga untuk mencapai tujuan: "Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan". Sasaran ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 2 (dua) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan upaya perlindungan kelestarian lingkungan hidup tersaji pada Tabel 3.36. berikut dibawah ini:

Tabel 3.36. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 25

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Indeks Pencemaran Udara	Indeks	74.80	74.79	96.22	129	75.25	127.9
2	Indeks Pencemaran Air	Indeks	45.14	63.33	60	133	45.41	132.1
Rata-rata Capaian						131		
Kategori Capaian						Sangat Memuaskan		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Meningkatnya jumlah bank sampah
- Optimalnya penyelenggaraan pemantauan pencemaran udara oleh perusahaan/industri dan pengembangan RTH di Kota Pasuruan

Hambatan/masalah :

- Kecenderungan warga tidak setuju kalau ada TPS 3R diletakkan di dekat rumahnya.
- Belum adanya studi kelayakan terkait pengadaan tanah untuk perluasan TPA.

- Kurangnya kesadaran dan kepedulian pemilik usaha dan/atau kegiatan terkait kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- Masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk menginformasikan atau melaporkan terkait adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kemauan menjadi kader lingkungan serta ketidakmerataannya SDM pada tiap kelurahan sehingga tidak semua kelurahan memiliki kader lingkungan.
- Kurangnya kader lingkungan yang akan diusulkan untuk menerima penghargaan kalpataru dikarenakan terbatasnya individu yang rela mendedikasikan hidupnya pada pelestarian lingkungan serta pelaksanaan regenerasi saka kalpataru yang sedikit terhambat
- Gagal lelang paket pekerjaan peningkatan taman kota dan paket pekerjaan pembangunan taman tematik Sekargadung
- Kurangnya tenaga pemelihara taman yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan, disamping pelaksanaan outsourcing terhadap pemeliharaan taman kurang memuaskan dari segi kinerja pihak ketiga.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Memberikan pengarahan ke kelurahan dan warga terkait rencana akan ditempati TPS 3R.
- Penyusunan studi kelayakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan terkait pengadaan tanah untuk perluasan TPA.
- Memperbanyak jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dengan harapan dengan semakin banyaknya usaha dan/atau kegiatan yang diawasi semakin banyak dari usaha dan/atau kegiatan yang ikut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan.
- Menginformasikan ke masyarakat tentang tata cara pengaduan melalui website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pasuruan, datang langsung ke kantor atau dapat juga melalui telpon dan SMS sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- Berkoordinasi dengan secara intens untuk merumuskan dalam pencarian kader lingkungan yang benar-benar mumpuni dan memiliki kemampuan dalam bidang lingkungan hidup.
- Memberikan motivasi dan peningkatan psikologi pada potensi kader lain yang diusulkan pada tahun 2018, disamping akan terus dilakukan pemdampingan terus-menerus oleh Tim Pembina Kalpataru DLHKP Kota Pasuruan.
- Pengusulan penganggaran kembali untuk kegiatan peningkatan taman kota dan kegiatan pembangunan taman tematik Sekargadung pada tahun anggaran 2019.
- Memaksimalkan tenaga pemelihara pertamanan sekaligus terus meningkatkan pemantauan terhadap kinerja outsourcing pihak ketiga sehingga dapat memaksakan dan memaksimalkan kinerja lebih baik lagi.

◆ Sasaran Strategis 26

“Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup”

Sasaran strategis 26 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan” dan juga untuk mencapai tujuan: “Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”. Sasaran ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 1 (satu) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup tersaji pada Tabel 3.37. berikut dibawah ini:

Tabel 3.37. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 26

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Jumlah bank sampah yang dibentuk setiap RW	Unit RW	173	125	130	75,14	238	55
Rata-rata Capaian						75.14		
Kategori Capaian						Sangat Baik		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Meningkatnya jumlah bank sampah dari 125 bank sampah menjadi 130 bank sampah

Hambatan/masalah :

- Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kemauan menjadi kader lingkungan serta ketidakmerataannya SDM pada tiap kelurahan sehingga tidak semua kelurahan memiliki kader lingkungan

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Berkoordinasi dengan secara intens untuk merumuskan dalam pencarian kader lingkungan yang benar–benar mumpuni dan memiliki kemampuan dalam bidang lingkungan hidup.

◆ Sasaran Strategis 27

“Meningkatnya penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan”

Sasaran strategis 27 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan” dan juga untuk mencapai tujuan: “Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”. Sasaran ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk mengukur sasaran

pertama ini ada 2 (dua) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan tersaji pada Tabel 3.38. berikut dibawah ini:

Tabel 3.38. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 27

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Persentase RTH	%	23.22	16.57	15,70	67,61	24.22	64.8
2	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	%	82.79	85.00	69,86	84,38	93.00	75.1
Rata-rata Capaian						76		
Kategori Capaian						Sangat Baik		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Bertambahnya Ruang Terbuka Hijau
- Meningkatnya anggaran perbaikan infrastruktur umum

Hambatan/masalah :

- Pertambahan kapasitas jalan, utamanya jalan kota dan jalang lingkungan, yang tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor
- Masih kurangnya kualitas jalan.
- Belum optimalnya pemeliharaan saluran air dan penyediaan resapan air hujan, sebagai bagian mitigasi banjir.
- Belum optimalnya penanganan genangan banjir.
- Tingginya laju alih fungsi lahan pada sawah/irigasi teknis

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Melakukan perencanaan penambahan kapasitas akses jalan baru.
- Melakukan pemeliharaan dan peningkatan jalan
- Melaksanakan pemeliharaan dan normalisasi terhadap saluran air dan penyediaan resapan air hujan secara berkala.
- Melaksanakan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan terkait dengan penanganan banjir.
- Meningkatkan fungsi pengendalian terhadap pemanfaatan ruang

◆ Sasaran Strategis 28

"Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah Kota Pasuruan"

Sasaran strategis 28 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik" dan juga untuk mencapai tujuan: "Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik".

Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Inspektorat, Bappeda, Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Organisasi, Bagian Hukum. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 3 (tiga) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah Kota Pasuruan tersaji pada Tabel 3.39. berikut dibawah ini:

Tabel 3.39. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 28

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	40	40	50	125	60	83
2	Opini BPK atas laporan keuangan daerah	Range	WDP	WDP	WTP	120	WTP	100
3	Nilai akuntabilitas kinerja	Range	B	B	B	100	BB	86
Rata-rata Capaian						115		
Kategori Capaian						Sangat Memuaskan		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui pengembangan inovasi berbasis Teknologi Informasi;
- Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia

Hambatan/masalah :

- Belum optimalnya pengelolaan potensi pendapatan asli daerah.
- Keterbatasan SDM penanganan pajak dan retribusi daerah.
- Minimnya penggalian potensi baru baik pajak maupun retribusi daerah.
- Belum tercatatnya data aset BMD secara sistematis menurut ketentuan Permendagri Nomor 16 tahun 2016;
- Lemahnya koordinasi penghapusan aset

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM penanganan pajak dan retribusi daerah.
- Melakukan eksplorasi potensi baru pajak dan retribusi daerah.
- Melakukan pencatatan data aset BMD secara sistematis sesuai Permendagri Nomor 16 tahun 2016.
- Mengintensifkan koordinasi terkait dengan penghapusan aset

◆ Sasaran Strategis 29

"Meningkatnya kualitas pelayanan publik"

Sasaran strategis 29 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik" dan juga untuk mencapai tujuan: "Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik". Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Bagian Organisasi dan seluruh perangkat daerah. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 1 (satu) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Meningkatkannya kualitas pelayanan publik tersaji pada Tabel 3.40. berikut dibawah ini:

Tabel 3.40. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 29

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	81.19	80.14	75.77	93.3	83.32	93.6
Rata-rata Capaian						93.3		
Kategori Capaian						Sangat Memuaskan		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Koordinasi yang baik antar UPP
- Adanya lomba penilaian inovasi UPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan

Hambatan/masalah :

- Masih adanya unit pelayanan publik yang belum memenuhi standar pelayanan publik sehingga capaian target indeks kepuasan masyarakat masih belum mencapai target.
- Masih adanya Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya menyusun SOP.
- Adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait urusan wajib pelayanan dasar, menimbulkan ketidak pastian Perangkat Daerah yang wajib melaporkan SPM.
- Masih rendahnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah.
- Masih rendahnya kualitas penerapan roadmap reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Perlunya pendampingan yang lebih intensif kepada unit pelayanan publik agar dapat memenuhi standar pelayanan publik.
- Perlunya pendampingan dan evaluasi kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur.
- Perlunya koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dasar penyusunan SPM, sekaligus pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan laporannya.
- Perlunya pendampingan kepada Perangkat Daerah khususnya dalam penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan.
- Perlunya peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pencapaian 8 goals reformasi birokrasi.

◆ Sasaran Strategis 30

"Meningkatnya pengelolaan dan tertib kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil"

Sasaran strategis 30 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik" dan juga untuk mencapai tujuan: "Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik". Sasaran ini didukung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 2 (dua) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan pengelolaan dan tertib kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tersaji pada Tabel 3.41 berikut dibawah ini:

Tabel 3.41. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 30

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Persentase penduduk ber-KTP	Persen	81.74	122.15	96.67	118.3	85.00	
2	Persentase bayi lahir ber-akta kelahiran	Persen	98.90	97.49	100	101	98.98	
Rata-rata Capaian						109.7		
Kategori Capaian						Sangat Memuaskan		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Kesadaran tinggi dari masyarakat untuk memiliki kartu identitas
- Adanya program jemput bola untuk mempercepat capaian target kepemilikan KTP (mobil KTP keliling)

Hambatan/masalah :

- Masih banyaknya data penduduk yang belum diperbarui dengan data terkini.
- Masih adanya penduduk yang pindah tempat tinggal tanpa surat keterangan pindah dan berekonomi lemah.
- Penduduk rentan administrasi kependudukan tidak dapat secara tuntas seluruhnya dapat diselesaikan, karena penduduk masih berada di luar negeri.
- Terbatasnya ruang untuk menampung arsip dokumen kependudukan.
- Beberapa peralatan perekaman dan pencetakan KTP elektronik mengalami kerusakan.
- tidak adanya kendaraan yang terintegrasi dengan peralatan perekaman biometrik.
- Beberapa peralatan dan perlengkapan pencetakan KIA yang belum tercukupi, antara lain printer beserta ribbonnya.
- Kurangnya pemahaman tentang pencatatan sipil akta kelahiran pada petugas registrasi di kelurahan sehingga masih ada persyaratan yang kurang lengkap sehingga akta tidak dapat terproses tepat waktu.

- Kurang proaktifnya orangtua untuk mendaftarkan akta kelahiran anaknya dikarenakan kurangnya informasi tentang tatacara pengurusan akta kelahiran serta kebiasaan masyarakat yang baru mengurus akta kelahiran pada saat diperlukan.
- Belum tersedianya peralatan scanner pada titik layanan persalinan sehingga berkas persyaratan tidak dapat terdigitalisasi.
- Adanya dokumen pencatatan sipil yang rusak yang diakibatkan oleh banjir pada tahun 2008.
- Kurang proaktifnya masyarakat untuk mendaftarkan akta kematian bagi keluarga yang ditinggalkan dikarenakan kurangnya informasi tentang tatacara pengurusan akta kematian serta kebiasaan masyarakat yang baru mengurus akta kematian pada saat diperlukan.
- Pemahaman masyarakat yang masih kurang, terutama masalah pencatatan kelahiran, kematian dan kartu keluarga.
- Masih sering terjadi kemacetan jaringan aplikasi antara dinas dengan kecamatan dan kelurahan.
- Akurasi database yang kurang optimal dan sarana prasarana di kelurahan dan kecamatan kurang memadai

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Direncanakan sinkronisasi biodata penduduk secara reguler setiap kurun waktu tertentu dan mensosialisasikan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan secara aktif berkomunikasi dan koordinasi lapangan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal penduduk yang bersangkutan.
- Akan dilaksanakan pendataan secara berkala terhadap penduduk di wilayah Kota pasuruan.
- Menggunakan ruangan lain sebagai penampung arsip sementara.
- Pada waktu mendatang perlu dilakukan peremajaan terhadap peralatan perekaman dan pencetakan KTP elektronik.
- Menggunakan area kelurahan serta tempat umum seperti GOR Kota Pasuruan dan Taman Kota dimana telah tersedia jaringan listrik dan internet yang memadai.
- Penggunaan printer dan ribbon KTP elektronik untuk mendorong percepatan pencetakan KIA.
- Mengadakan Bimbingan Teknis untuk petugas registrasi dikelurahan yang akan dilaksanakan di tahun 2018 melalui kegiatan Sosialisasi Pelayanan Pencatatan Sipil.
- 1 (satu) minggu sebelum Tim Pelayanan Mobile Akta Kelahiran melaksanakan Kegiatan Pelayanan Akta Kelahiran Mobile di Kelurahan yang akan dituju sebelumnya didahului dengan Kegiatan Bintek RT, RW dan Petugas Pelayanan Pencatatan Sipil, yang menghadirkan peserta Ketua RT/ RW di Kelurahan tersebut guna mensosialisasikan pentingnya kepemilikan akta kelahiran serta tatacara dan prosedur pendaftaran pada hari yang ditentukan di kelurahan dimaksud, serta Ketua RT/RW dibekali data serta

undangan kepada masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran untuk datang dan melakukan pemberkasan permohonan penerbitan akta kelahiran karena dalam pelayanan akta kelahiran mobile semua pengurusan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan pada hari itu juga artinya mulai pemberkasan, penandatanganan Lurah, legalisir Surat Nikah serta penerbitan kutipan akta kelahiran langsung bisa di eksekusi dan di bawa pulang oleh pemohon akta kelahiran pada hari itu juga.

- Melakukan koordinasi dengan layanan persalinan agar dapatnya menyediakan alat scanner untuk layanan akta kelahiran di layanan persalinan agar semua dokumen dapat terdigitalisasi serta untuk memudahkan verifikasi yang berimplikasi pada percepatan penerbitan kutipan akta kelahiran sehingga motto Layanan BANGKIT (Bayi Lahir Langsung Akta Terbit) dapat terlaksana dan diharapkan saat pulang dari layanan persalinan bayi dan kutipan akta kelahiran sudah ditangan.
- Membuat catatan tersendiri terhadap permohonan perubahan kutipan akta dengan dasar fotocopy kutipan akta yang diajukan oleh pemohon.
- 1 (satu) minggu sebelum Tim Pelayanan Mobile Akta Kematian melaksanakan Kegiatan Pelayanan Akta Kematian Mobile di Kelurahan yang akan dituju sebelumnya didahului dengan Kegiatan Bintek RT, RW dan Petugas Pelayanan Pencatatan Sipil, yang menghadirkan peserta Ketua RT/ RW di Kelurahan tersebut guna mensosialisasikan pentingnya kepemilikan akta kematian serta tatacara dan prosedur pendaftaran pada hari yang ditentukan di kelurahan dimaksud, serta Ketua RT/RW dibekali data serta undangan kepada masyarakat dimana keluarganya yang sudah meninggal akan tetapi datanya masih muncul pada Aplikasi SIAK, sehingga harus mengurus akta kematian terlebih dahulu untuk menghapus data pada Aplikasi SIAK, semua pengurusan dan penerbitan akta kematian dilaksanakan pada hari itu juga artinya mulai pemberkasan, penandatanganan Lurah, legalisir Surat Nikah bagi si jenazah (bila memiliki) serta penerbitan kutipan akta kematian langsung bisa di eksekusi dan di bawa pulang oleh pemohon akta kematian pada hari itu juga.
- Perlunya sosialisasi kepada masyarakat melalui RT atau RW yang terus menerus dan berkelanjutan.
- Adanya koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan agar pelayanan mudah, murah, cepat dan ramah untuk mencapai kepuasan publik.
- Pengadaan software aplikasi administrasi kependudukan tingkat kelurahan dan kecamatan untuk memperoleh hasil database penduduk SIAK yang akurat (valid).

◆ Sasaran Strategis 31

"Meningkatnya kerukunan antar umat beragama"

Sasaran strategis 31 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial" dan juga untuk mencapai tujuan: "Mengembangkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, untuk membangun harmoni sosial dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat". Sasaran ini didukung

oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 1 (satu) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya kerukunan antar umat beragama tersaji pada Tabel 3.42. berikut dibawah ini:

Tabel 3.42 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 31

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Jumlah konflik sosial berlatar belakang agama	Kasus	0	0	0	100	0	100
Rata-rata Capaian						100		
Kategori Capaian						Sangat Memuaskan		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, TNI/POLRI dan tokoh agama.

Hambatan/masalah :

- Belum maksimalnya pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kecamatan dan Kelurahan.
- Masih rendahnya tingkat koordinasi dan konsultasi antar pihak terkait dalam penanganan keamanan dan ketertiban

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Mengoptimalkan keberadaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kecamatan dan Kelurahan.
- Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar pihak terkait dalam penanganan keamanan dan ketertiban

◆ Sasaran Strategis 32

“Terbangunnya suasana lingkungan yang aman dan tertib”

Sasaran strategis 32 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial” dan juga untuk mencapai tujuan: “Mengembangkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, untuk membangun harmoni sosial dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat”. Sasaran ini didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 2 (dua) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Terbangunnya suasana lingkungan yang aman dan tertib tersaji pada Tabel 3.43. berikut dibawah ini:

Tabel 3.43. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 32

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Jumlah kasus pelanggaran perda	Perda	524	855	7	7485	445	52.5
2	Angka Kriminalitas	Per 10.000 pddk	26.86	17,55	24,18	111	18.83	77.8
Rata-rata Capaian						3798		
Kategori Capaian						Sangat Memuaskan		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Jumlah kasus kriminalitas yang cenderung menurun
- Jumlah pelanggaran perda yang menurun ditahun 2017

Hambatan/masalah :

- Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Peraturan Daerah yang ada
- Kurangnya koordinasi dan konsultasi antar pihak terkait

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Sosialisasi akan penerapan sebuah Peraturan Daerah pada masyarakat perlu ditingkatkan
- Koordinasi dan konsultasi antar pihak terkait perlu dioptimalkan

◆ Sasaran Strategis 33***“Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, yang didukung dengan ketanggapan penanggulangan bencana”***

Sasaran strategis 33 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial” dan juga untuk mencapai tujuan: “Mengembangkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, untuk membangun harmoni sosial dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat”. Sasaran ini didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 2 (dua) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, yang didukung dengan ketanggapan penanggulangan bencana tersaji pada Tabel 3.44. berikut dibawah ini:

Tabel 3.44. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 33

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Time response pemadaman kebakaran	Menit	15	14	17	88,23	15	88
2	Time response penanggulangan bencana	Menit	15	14	16	93,75	15	93.7
Rata-rata Capaian						91		
Kategori Capaian						Sangat Memuaskan		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- BPBD dapat mendeteksi dini kalau akan terjadi bencana, khususnya banjir
- Adanya regu piket sehingga informasi dapat diketahui real time 24 jam
- Telah terbentuknya Kelurahan tangguh bencana, sehingga mengurangi resiko dan dampak bencana

Hambatan/masalah :

- Masih kurangnya mitigasi bencana

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Perlu dibentuknya Tim SAR kota
- Perlunya penambahan personel yang berkualitas
- Sarana penanggulangan bencana yang perlu ditambah

◆ Sasaran Strategis 34**"Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM dalam kerangka wawasan kebangsaan"**

Sasaran strategis 34 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial" dan juga untuk mencapai tujuan: "Mengembangkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, untuk membangun harmoni sosial dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat". Sasaran ini didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 1 (satu) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM dalam kerangka wawasan kebangsaan tersaji pada Tabel 3.45. berikut dibawah ini:

Tabel 3.45. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 34

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Jumlah kasus pelanggaran HAM	kasus	0	0	0	100	0	100
Rata-rata Capaian						100		
Kategori Capaian						Sangat Memuaskan		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Koordinasi lintas sektoral yang sudah berjalan dengan baik

Hambatan/masalah :

- Kurangnya sosialisasi peraturan terkait perlindungan dan pelanggaran HAM

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Perlu ditingkatkan lagi sosialisasi peraturan terkait perlindungan dan pelanggaran HAM

◆ Sasaran Strategis 35***“Meningkatnya upaya pelestarian artefak dan nilai-nilai budaya serta tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial”***

Sasaran strategis 35 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial” dan juga untuk mencapai tujuan: “Mengembangkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, untuk membangun harmoni sosial dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat”. Sasaran ini didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 2 (dua) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan upaya pelestarian artefak dan nilai-nilai budaya serta tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial tersaji pada Tabel 3.46. berikut dibawah ini:

Tabel 3.46. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 35

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi		Capaian	Akhir RPJMD	
				2016	2017		Target	Capaian
1	Jumlah benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Unit	18	8	18	100	20	90
2	Jumlah kelompok seni dan budaya lokal yang aktif	Kelompok	149	147	149	100	158	94
Rata-rata Capaian Kategori Capaian						100	Sangat Memuaskan	

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Banyak even kesenian yang digelar pemerintah Kota Pasuruan
- Adanya regulasi terkait penetapan cagar budaya sehingga bisa dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk pelestariannya

Hambatan/masalah :

- Menurunnya minat generasi muda untuk mempelajari budaya dan kesenian daerah
- Belum optimalnya upaya pelestarian artefak budaya, terutama yang berkaitan dengan sejarah Kota Pasuruan

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Memperbanyak even-even kesenian dan budaya daerah sebagai upaya memperkenalkan budaya kepada generasi muda dengan dibalut dengan konsep modern/kekinian.
- Mengoptimalkan lagi upaya pelestarian artefak budaya di wilayah Kota Pasuruan dengan memperkuat dasar regulasi yang ada.



PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2017 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2017. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2017 ini dapat menggambarkan keberhasilan kinerja Pemerintah Kota Pasuruan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2017. Ada 7 (tujuh) kinerja tujuan dengan 34 (tigapuluh empat) sasaran strategis yang diwujudkan untuk pencapaian misi Kota Pasuruan, dengan rincian sebagai berikut:

**7 MISI
WALIKOTA**

**7 Kinerja Tujuan dengan 7 IKU
34 Kinerja Sasaran dengan 102 IKT**

Dari pencapaian Misi dengan 7 (tujuh) kinerja tujuan dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama dan 34 (tigapuluh empat) sasaran strategis dengan 102 (seratus dua) Indikator Kinerja Sasaran, ada beberapa capaian Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Sasaran yang dinilai berhasil dan ada pula capaian yang dinilai kurang berhasil. Adapun keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2017 antara lain:

Tabel 4.1 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian													
				Sangat Memuaskan		Memuaskan		Sangat Baik		Baik		Cukup		Kurang		Sangat Kurang	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
MISI 1																	
1.	Tujuan 1	1															
1.1	Sasaran 1	1	97.3	1	97.3												
1.2	Sasaran 2	14	97.14	9	206			1	75					4	0		
1.3	Sasaran 3	6	69.09	4	104									2	0		
MISI 2																	
2.	Tujuan 2	1															
2.1	Sasaran 4	3	132.03	2	162			1	72								
2.2	Sasaran 5	12	102.06			3	88.4	2	70								
2.3	Sasaran 6	1	72					1	72								
MISI 3																	
3.	Tujuan 3	3															
3.1	Sasaran 7	1	99.90	1	99.9												
3.2	Sasaran 8	1	110	1	110												
3.3	Sasaran 9	2	142.3	2	142												
3.4	Sasaran 10	1	105.84	1	106												
3.5	Sasaran 11	4	104.4	4	104												
3.6	Sasaran 12	1	98.56	1	98.6												
3.7	Sasaran 13	3	507	2	743						1	50					
3.8	Sasaran 14	2	10.5											2	10		
MISI 4																	
4.	Tujuan 4	1															
4.1	Sasaran 15	2	162.5	1	264					1	61						
4.2	Sasaran 16	4	81	3	99.2									1	26		
4.3	Sasaran 17	3	63.22	2	94.8									1	0		
4.4	Sasaran 18	2	102	2	102												

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian													
				Sangat Memuaskan		Memuaskan		Sangat Baik		Baik		Cukup		Kurang		Sangat Kurang	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
4.5	Sasaran 19	2	165.5	1	300											1	2.5
4.6	Sasaran 20	4	70	2	101					1	67					1	10
4.7	Sasaran 21	3	113	3	113												
4.8	Sasaran 22	3	289.2	3	289												
MISI 5																	
5.	Tujuan 5	1															
5.1	Sasaran 23	4	103	3	108	1	87.36										
5.2	Sasaran 24	4	96.95	2	107	2	86.6										
5.3	Sasaran 25	2	131	2	131												
5.4	Sasaran 26	1						1	75								
5.5	Sasaran 27	2				1	84.4			1	68						
MISI 6																	
6.	Tujuan 6	1															
6.1	Sasaran 28	3	115	3	115												
6.2	Sasaran 29	1	93.3	1	93.3												
6.3	Sasaran 30	2	109.7	2	110												
MISI 7																	
7.	Tujuan 7	1															
7.1	Sasaran 31	1	100	1	100												
7.2	Sasaran 32	2	3798	2	3798												
7.3	Sasaran 33	2	91	1	93.7	1	88.2										
7.4	Sasaran 34	1	100	1	100												
7.5	Sasaran 35	2	100	2	100												

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa :

Capaian Tujuan :

9 indikator sasaran masuk kategori “Sangat Memuaskan”

Capaian Sasaran :

65 indikator sasaran yang masuk kategori “Sangat Memuaskan”

8 indikator sasaran masuk kategori “Memuaskan”

6 Indikator sasaran masuk kategori “Sangat Baik”

3 Indikator sasaran masuk kategori “Baik”

1 Indikator sasaran masuk kategori “Cukup”

0 indikator sasaran masuk kategori “Kurang”

12 indikator sasaran masuk kategori “Sangat Kurang”

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016-2021, dan khususnya untuk tahun 2017 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2017 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

B. SARAN

Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan belum memenuhi kriteria indikator yang baik, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki. Dan untuk menyempurnakan Laporan Kinerja di tahun-tahun selanjutnya, kami mohon masukan serta saran dari evaluator maupun *stakeholder* yang berhubungan dengan kami. Semoga kinerja Pemerintah Kota Pasuruan semakin meningkat dikemudian hari.